



# Rencana Strategis (RENSTRA)

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029** dapat tersusun dengan baik.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, serta target kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya di bidang peternakan dan perikanan.

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh semangat untuk mewujudkan pembangunan peternakan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak terkait, melalui diskusi, serta pengumpulan data dan informasi agar menghasilkan dokumen yang komprehensif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan. Namun demikian, besar harapan kami Renstra ini dapat menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun program dan kegiatan, serta menjadi instrumen pengendali dan evaluasi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar selama periode 2025-2029.

Blitar, 19 September 2025  
Plt. KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR



**HERI WIDYATMOKO, S.Pt**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197201151998031006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.3 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGI .....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan .....	III-1
3.2 Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan.....	III-3
3.3 Arah Kebijakan.....	III-12
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Program.....	IV-1
4.2 Kegiatan .....	IV-1
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target, dan Pagu Indikatif.....	IV-37
4.4 Program, Kegiatan, dalam Rangka Mendukung Program Prioritas.....	IV-102
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-103
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-107



BAB V. PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan.....	IV-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	IV-2
5.1 Pengendalian dan Evaluasi.....	IV-2



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Penunjang PD .....	II-12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	II-14
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	II-22
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	II-23
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Capaian Anggaran .....	II-24
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan .....	II-28
Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis .....	II-32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	III-6
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Peternakan.....	III-12
Tabel 3.3 Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-14
Tabel 4.1 Daftar Program Kegiatan .....	IV-2
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	IV-5
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan.....	IV-38
Tabel 4.4 Daftar Program Kegiatan Prioritas Pembangunan .....	IV-102
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	IV-104
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	IV-107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi .....	II-9
Gambar 2.2 Komposisi SDM berdasar Jenjang Pendidikan .....	II-10
Gambar 2.3 Komposisi SDM berdasar Jenjang Golongan .....	II-11
Gambar 2.4 Capaian Produksi Perikanan Tangkap .....	II-19
Gambar 2.5 Capaian Produksi Perikanan Budidaya .....	II-19
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra .....	III-5



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan strategis bagi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi ini mencakup penyusunan dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sebagai dokumen yang bersifat indikatif. Yang ditindaklanjuti dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sebagai institusi pemerintah daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memiliki kewajiban melekat untuk menyusun Renstra 2025-2029. Penyusunan ini merupakan langkah penting untuk menentukan arah perkembangan perangkat daerah dalam menghadapi tuntutan perubahan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang. Renstra ini menjadi pedoman dalam merumuskan visi, misi, dan strategi guna meraih keberhasilan di masa mendatang.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dirumuskan untuk memberikan arah perencanaan selama lima tahun. Renstra ini juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk periode 2026-2029 wajib mengacu pada RPJMD tersebut.



Dengan penyusunan Renstra ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memastikan bahwa visi dan misinya selaras dengan kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan dan perikanan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-



- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 adalah memberikan pedoman arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Blitar tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang terukur guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang dapat diukur secara berkala;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Perikanan setiap tahunnya;
5. Menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Renstra terhadap perubahan peraturan perundangan yang berlaku.



## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Bab ini dirinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

Bab ini menyajikan gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar serta permasalahan dan isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan. Bab ini dijelaskan dan dirinci dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini disajikan arah perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar yang dijelaskan dan dirinci dalam sub bab sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran



## Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029

### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN URUSAN

Pada bab ini disajikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam periode tahun 2025–2029 yang disajikan dalam sub bab berikut:

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang dirinci dalam sub bab berikut:

- 5.1 Kesimpulan Substansi
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Dinas Peternakan Dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan rencana dan program kerja Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan perencanaan dinas serta rumah tangga Dinas;
- c. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan *sustainable development goals* hewan dalam Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- g. pelaksanaan koordinasi pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penetapan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Provinsi Jawa Timur;
- i. pelaksanaan koordinasi pengembangan prasarana peternakan, lahan penggembalaan umum;
- j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak



- dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dan penetapan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (*zoonosis*) dalam Daerah;
  - l. pelaksanaan koordinasi pengawasan pemasukan hewan dan produk asal hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk asal hewan dari Daerah;
  - m. pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium bidang peternakan dan perikanan serta jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - n. pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan persyaratan dan pembinaan persyaratan teknis *hygiene* sanitasi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - o. pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit hewan dan bencana alam yang berakibat pada hewan;
  - p. penerbitan izin usaha peternakan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan serta izin usaha pengecer obat hewan, surat keterangan kesehatan hewan dan produk asal hewan;
  - q. pelaksanaan validasi bahan dan menetapkan kebijakan kenelayanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - r. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan kenelayanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - s. penetapan kebijakan fasilitasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
  - t. pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Dinas; dan
  - u. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang terkait bidang peternakan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dijelaskan Struktur Organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, memverifikasi penyusunan program dan perencanaan Dinas, menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- 2) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 5) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 6) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 7) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 10) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
- 11) Pengelolaan kearsipan;
- 12) Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- 13) Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- 8) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- 10) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pengamatan dan surveilans penyakit hewan;



- 7) Pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan dan pembinaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan obat hewan di tingkat pengecer;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (zoonosis) dalam Daerah;
- 10) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan pemasukan hewan dan produk asal hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk asal hewan dari Daerah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta jasa medik dan paramedik veteriner di Daerah;
- 12) Pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan dan pembinaan persyaratan teknis hygiene sanitasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 13) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana/wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam yang berakibat pada peternakan;
- 14) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penerbitan izin usaha klinik hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- 15) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, surat keterangan kesehatan hewan dan produk asal hewan;
- 16) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- 17) Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

d. Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan

Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Budi Daya dan Pengembangan Peternakan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi :



- 1) Pelaksanaan verifikasi bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Bidang Budi Daya dan Pengembangan Peternakan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik hewan dan mikro organisme yang menjadi kewenangan Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan penyediaan, peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak di Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang bersumber dari wilayah Daerah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pembangunan sarana prasarana budi daya pengembangan peternakan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana budidaya dan pengembangan ternak;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penerbitan izin usaha peternakan yang kegiatan usahanya di Daerah;
- 10) Pelaksanaan koordinasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan serta pasar hewan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyuluhan peternakan;
- 12) Pelaksanaan koordinasi penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang bersumber dari wilayah Provinsi Jawa Timur
- 13) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah;
- 14) Pelaksanaan koordinasi pengembangan lahan penggembalaan umum;
- 15) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium pakan ternak;
- 16) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Bidang Budi Daya dan Pengembangan Peternakan; dan
- 17) Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.



e. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan urusan pengelolaan perikanan tangkap, kenelayanan, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengawasan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan verifikasi konsep perumusan kebijakan program kerja untuk acuan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perikanan tangkap;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kenelayanan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- 6) Pelaksanaan koordinasi verifikasi pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah; 16 g. Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
- 7) Pelaksanaan koordinasi pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
- 8) Pelaksanaan koordinasi verifikasi bahan kebijakan teknis fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- 10) Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

f. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan



perikanan budidaya, pemberdayaan pelaku usaha perikanan budi daya, fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengelolaan pembudidaya ikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan konsep program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- 4) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil di Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana budi daya perikanan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budi daya di Daerah;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium perikanan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan budi daya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
- 10) Pelaksanaan koordinasi terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
- 11) Pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan publikasi produk dan potensi perikanan budi daya;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan Bidang Perikanan Budi Daya;
- 13) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Bidang Perikanan Budi Daya;



- 14) Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melihat dan mengetahui susunan organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan**

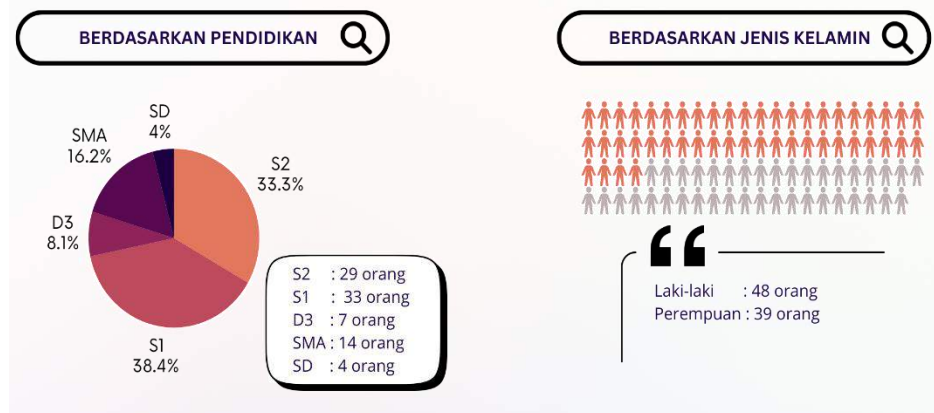
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Dalam menunjang sub sektor peternakan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut.



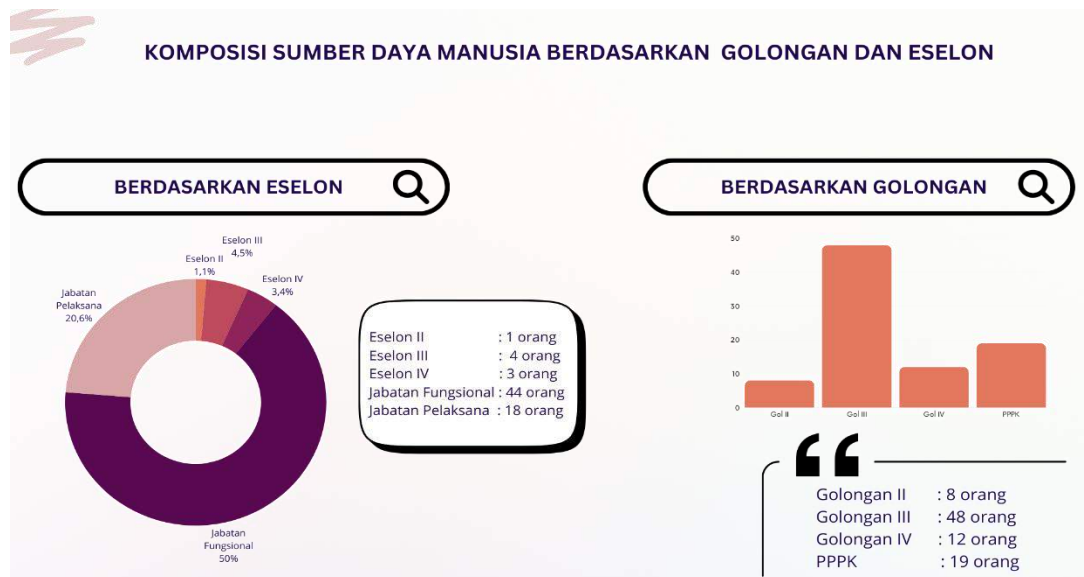
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL DAN JENIS KELAMIN



**Gambar 2.2 Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yaitu lulusan S1 sebanyak 33 orang (38,4%) dan S2 sebanyak 29 orang (33,7%). Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung profesionalisme kerja dan pelaksanaan program yang membutuhkan analisis serta pengambilan keputusan strategis. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah dan dasar, yakni lulusan SMA sebanyak 14 orang (16,3%), D3 sebanyak 7 orang (8,1%), serta SD sebanyak 4 orang (4%). Kondisi ini menandakan perlunya strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjut maupun pelatihan teknis agar tidak menimbulkan kesenjangan kompetensi di lingkungan kerja. ditinjau dari aspek jenis kelamin, terdapat 48 pegawai laki-laki dan 39 pegawai perempuan, sehingga komposisi gender relatif seimbang dengan selisih yang tidak terlalu besar. Keseimbangan ini mencerminkan adanya potensi kolaborasi yang lebih inklusif dalam mendukung tugas kelembagaan.



**Gambar 2.3 Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Golongan dan Eselon Dinas Peternakan dan Perikanan**  
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menunjukkan struktur yang beragam baik dari sisi jabatan eselon maupun golongan. Berdasarkan eselon, terdapat 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III, dan 3 orang pejabat Eselon IV. Jumlah terbesar berada pada jabatan fungsional sebanyak 44 orang, diikuti jabatan pelaksana sebanyak 18 orang. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar SDM lebih difokuskan pada peran teknis operasional dan fungsional, yang memang sangat relevan dengan kebutuhan sektor peternakan dan perikanan yang membutuhkan tenaga ahli serta pelaksana di lapangan.

Jika ditinjau dari aspek golongan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III sebanyak 48 orang, yang menandakan tingkat kematangan karier dan pengalaman kerja yang cukup dominan. Sementara itu, terdapat 12 orang pada Golongan IV, 8 orang pada Golongan II, serta 19 orang berstatus PPPK. Komposisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pegawai senior, pegawai menengah, dan pegawai kontrak pemerintah yang dapat saling melengkapi dalam melaksanakan tugas kelembagaan.



Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diperlukan sarana dan prasarana penunjang OPD yang memadai, hingga saat ini sarana dan prasarana yang tersedia pada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Penunjang OPD Tahun 2025**

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	Pompa Air	76	76		
2	Alat Peternakan Lainnya	122	122		
3	Alat Perikanan	95	95		
4	Alat Kedokteran	164	164		
5	Alat Rumah Tangga Lain	53	53		
6	Alat Laboratorium Pertanian	5	5		
7	Thermometer	22	22		
8	Alat Laboratorium Pakan	62	62		
9	Alat Laboratorium Pertanian	5	5		
10	Alat Laboratorium lainnya	139	139		
11	Mobil	8	8		
12	Sepeda Motor	27	27		
13	Kendaraan Roda Tiga	3	3		
14	Peralatan Personal Komputer	30	10		20
15	Televisi	20	20		
16	Loudspeaker	7	7		
15	Lemari	74	74		
17	Kursi	242	242		
18	Meja Kerja	101	101		
19	Timbangan	29	29		
20	Penyemprot	23	23		
21	Laptop	49	23	21	5
22	PC Unit	13	7	4	2
23	Printer	54	25	8	21
24	Filling Kabinet	40	40		
25	Lemari Es	7	7		
26	Mikroskop	7	7		
27	AC	16	16		
28	Kipas Angin	3	3		
29	Meubelier	5	5		
30	Mesin	20	20		
31	Kamera	15	15		
32	UPS	12	12		
33	Telepon	25	25		
34	Papan Nama	5	5		



NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
35	Layar Film	1	1		
36	Peralatan Studio Lainnya	3	3		
37	CCTV	2	2		
38	LCD Proyektor	3	3		
39	Bangunan Gedung Kantor	2	2		
40	Unit Pembenihan Ikan	3	3		
41	Raiser Ikan Hias	1	1		
42	Rumah Potong Hewan	4	4		
43	Pusat Kesehatan Hewan	12	12		
44	RRMC	1	1		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisinya maka secara umum dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu dapat memberikan dukungan didalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, namun untuk kedepan diperlukan pengadaan atau perbaikan sarana prasarana sebagai upaya meningkatkan kinerja.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan**

#### **2.1.3.1 Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan**

Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan selama 2021-2024 mengacu pada tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026. Capaian ini menggambarkan seberapa efektif program dan kegiatan yang telah dijalankan dalam mencapai target pembangunan sektor peternakan dan perikanan. Tujuan dari evaluasi capaian kinerja 2020-2024 ini adalah untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program selama 5 (lima tahun terakhir, menganalisa keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja dan sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja dan strategi di tahun-tahun berikutnya.

Komponen utama dalam evaluasi capaian kinerja di Dinas Peternakan dan Perikanan ini adalah mengukur tingkat ketercapaian indikator tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta program yang telah dilaksanakan .



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Tujuan																		
1.	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan					5,5	4,99	5,5	5,9	6,3	4,75	4,70	4,74	4,36	95,19	85,45	80,34	69,21
2.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan					13,8	13,4	13,8	14,6	14,9	13,26	12,90	12,87	12,6	98,96	93,48	88,15	84,56
Indikator Kinerja Utama																		
1.	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah					80/A	80/A	80/A	80/A	80/A	81,47/A	88,5/A	81,47/A	73,4/BB	101,84	110,63	101,84	91,75
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan					-34,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,14	-22,48	72,71	-5,77	70,00	-7493,33	18177,50	-5770,00
3.	Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan					0,42	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,16	0,2	0,34	60,00	32,00	40,00	68,00
4.	Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis					Na	Na	Na	80	80	Na	Na	91	92,3	Na	Na	113,75	115,38



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5.	Prosentase Produk Peternakan Yang Layak Edar					97,2	98	98,1	98,1	98,2	98,1	95,05	97	97,9	100,10	96,89	98,88	99,69
Indikator Kinerja Kunci																		
1.	Jumlah Produksi Perikanan		√															
	- Jumlah produksi perikanan tangkap					2.284	2.300	2.536	2.663	2.769	2.283	1454,3	3.545,3	3.093,80	99,26	57,35	133,13	111,73
	- Jumlah produksi perikanan konsumsi					17.762,90	17.800	17.978	18.158	18.339	17.841	16.426,26	16.900,08	17.301,30	100,23	91,37	93,07	94,34
	- Jumlah produksi perikanan non konsumsi					224.127.450	224.127.450	227.250.000	229.522.500	231.817.725	225.281.796	203.946.310	204.778.495	204.827.074	100,52	89,75	89,22	88,36
2.	Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		√			Na	Na	Na	80	80	Na	Na	91	92,3	Na	Na	113,75	115,38
3.	Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan		√			0,42	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,16	0,2	0,34	60,00	32,00	40,00	68,00



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Program																		
1.	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah					Na	87,14	100	100	100	94,67	88,5	100	100	108,64	88,50	100,00	100,00
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		√			2.284	2.300	2.536	2.663	2.769	2.283	1454,3	3.545,3	3.093,80	99,26	57,35	133,13	111,73
3.	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi		√			17.762,90	17.800	17.978	18.158	18.339	17.841	16.426,26	16.900,08	17.301,30	100,23	91,37	93,07	94,34
4.	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias		√			224.127.450	224.127.450	227.250.000	229.522.500	231.817.725	225.281.796	203.946.310	204.778.495	204.827.074	100,52	89,75	89,22	88,36
5.	Prosentase Pengolahan produk perikanan					Na	Na	10	20	22	Na	7,3	10,5	13,9	Na	73,00	52,50	63,18
6.	Prosentase Peningkatan Produksi PUD					Na	Na	3	5	5	Na	6,3	6,45	4,45	Na	210,00	129,00	89,00
7.	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak					Na	0,1	0,3	0,3	0,3	0,12	-0,49	0,8	0,29	120,00	-163,33	266,67	96,67



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8.	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi					Na	70	72	72	72	67	65	65	78	95,71	90,28	90,28	108,33
9.	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap					87	81	81	83	85	87	86	89	93,1	107,41	106,17	107,23	109,53
10.	Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi					21	26	26	28	30	38	31	34	35	146,15	119,23	121,43	116,67
11.	Prosentase Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian					Na	Na	100	100	100	Na	96,9	100	100	Na	96,90	100,00	100,00
12.	Prosentase Peningkatan jumlah pengajuan Perizinan					Na	20	20	20	20	2	4	5	7	10,00	20,00	25,00	35,00
13.	Prosentase peningkatan peternak terampil					22,3	8	8	8	8	8	8,11	9,6	9,2	100,00	101,38	120,00	115,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



Berdasarkan tabel di atas, beberapa faktor pendukung atas capaian kinerja pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dalam mendukung produktivitas peternakan maupun perikanan;
- b. Dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam bentuk anggaran dan program bantuan kepada peternak, pembudidaya dan nelayan;
- c. Peningkatan konsumsi produk hasil perikanan dan peternakan di masyarakat yang dapat mendorong peningkatan produksi perikanan maupun perikanan;
- d. Program pelatihan dan pendampingan bagi peternak, pembudidaya dan nelayan.

Sedangkan faktor penghambat atas capaian kinerja pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Cuaca ekstrem dan perubahan iklim berdampak pada produksi perikanan dan peternakan, seperti penurunan hasil tangkapan ikan dan meningkatnya risiko penyakit ternak;
- b. Harga pakan ikan yang sering naik mengurangi keuntungan pembudidaya ikan;
- c. Kurangnya tenaga kesehatan hewan yang mendukung program pengendalian penyakit dan peningkatan produktivitas;
- d. Masih adanya penyakit hewan menular strategis yang mempengaruhi produktivitas ternak;

Berdasarkan tabel 2.2 di atas bahwasanya terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, melebihi target dan capaian kinerja yang fluktuatif.

- a. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator ini mengalami capaian kinerja yang fluktuatif, pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis sebesar -22,45% sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikansi sebesar 72,72%, dan pada tahun 2024 justru mengalami penurunan kembali sebesar -5,77%. Capaian kinerja yang sangat fluktuatif ini disebabkan produksi perikanan tangkap yang sangat bergantung dengan cuaca. Pada tahun 2022 di Indonesia mengalami fenomena La-Nina yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut, sedangkan di tahun 2023 di Indonesia mengalami fenomena El-Nino atau kemarau panjang sehingga pasokan ikan di laut meningkat.



**Gambar 2.4 Capaian Produksi Perikanan Tangkap**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Selain perikanan tangkap, prosentase peningkatan produksi perikanan juga dihitung dari capaian produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya terdiri dari produksi ikan konsumsi dan non konsumsi. Produksi perikanan konsumsi Kabupaten Blitar pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang sempat mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2024. Pada tahun 2021 produksi tercatat sekitar 17.845 ton, kemudian turun menjadi 17.149 ton pada tahun 2022 dan 16.966 ton pada tahun 2023.



**Gambar 2.5 Capaian Produksi Perikanan Budidaya**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan produksi menjadi 17.301,3 ton sehingga target tahunan sebesar 17.300 ton berhasil tercapai dengan capaian 100,01%. Produksi perikanan konsumsi tahun



2024 didominasi oleh ikan lele sebesar 9.057,4 ton (sekitar 52,3% dari total produksi) dan nila sebesar 6.971,1 ton (sekitar 40,3%), sedangkan gurami, udang vaname, dan patin memberikan kontribusi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa lele dan nila merupakan komoditas utama yang menopang ketersediaan ikan konsumsi di Kabupaten Blitar, sementara pengembangan patin masih perlu mendapat perhatian jika ingin ditingkatkan peran produksinya. Sementara itu, produksi perikanan non-konsumsi (ikan hias) menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2021 produksi ikan hias mencapai 225.281.796 ekor, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 203.946.310 ekor atau turun sekitar 9,5 persen. Meskipun demikian, produksi mulai stabil pada tahun 2023 dengan capaian 204.778.495 ekor dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 204.827.074 ekor. Target produksi tahun 2024 sebesar 204.780.000 ekor berhasil tercapai dengan realisasi yang sedikit melampaui target. Walaupun target telah terpenuhi, produksi ikan hias belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 sehingga diperlukan upaya strategis untuk mengembalikan peningkatan produksi perikanan non konsumsi.

b. Prosentase Peningkatan Produktifitas Peternakan

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas ternak, yaitu perbandingan antara produktifitas ternak (daging, susu dan telur) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Produktivitas ternak adalah ukuran atau tingkat kemampuan ternak dalam menghasilkan produk atau hasil ternak tertentu, seperti daging, susu, telur, kulit, dalam kurun waktu tertentu.

Jika dianalisa dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tingkat capaian peningkatan produktivitas ternak di tahun 2024 mengalami peningkatan bertahap yang signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang mengganggu produktivitas ternak seperti susu sapi perah yang tidak dapat berproduksi saat ternak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sedangkan di tahun 2024 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah dapat terkendali sehingga produktivitas ternak menunjukkan peningkatan, meskipun pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember di Kabupaten Blitar mulai mewabah kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).



c. Prosentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis

Prosentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategi merupakan ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan pengendalian penyakit hewan menular strategis di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya pengendalian, pencegahan, dan penanganan penyakit menular strategis dilakukan sehingga wilayah tertentu dapat dikategorikan aman atau terkendali dari potensi penyebaran penyakit hewan tersebut.

Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan berhasil mencapai realisasi indikator pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 92,3%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM kita yang mumpuni dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kabupaten Blitar. Dari total 248 desa dan kelurahan, sebanyak 229 wilayah bebas kasus atau terkendali dengan kematian nihil, meskipun masih terdapat 19 wilayah terdampak dengan kasus kematian.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 prosentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis mengalami peningkatan, dikarenakan pada tahun 2023 tidak hanya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak akan tetapi juga terdapat penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD). Tingginya ancaman terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) telah diimbangi dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya ini demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sehat dan aman dari ancaman penyakit hewan menular.

d. Prosentase Produk Peternakan Yang Layak Edar

Pada tahun 2024, indikator kinerja utama prosentase produk peternakan yang layak edar menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 97%, Kabupaten Blitar berhasil merealisasikan 97,9%. Prosentase ini merupakan hasil perbandingan antara produk peternakan yang layak edar dengan total jumlah produk yang diawasi.

Meskipun menghadapi tantangan berupa mewabahnya kasus Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap produk peternakan yang beredar. Hasil pengawasan



menunjukkan bahwa produk peternakan yang layak edar di Kabupaten Blitar tetap melebihi target yang telah ditentukan.

### 2.1.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan salah faktor satu penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, kinerja keuangan dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi belanja. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kontribusi langsung sektor peternakan dan perikanan terhadap pendapatan daerah. Realisasi belanja mencerminkan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan, baik pada peternakan maupun perikanan.

Pada bagian ini disampaikan kinerja keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dari Tahun 2021 – 2024. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain;

1. Perencanaan yang belum optimal, masih adanya belanja modal yang tidak masuk pada RKBMD maupun SSH/SBU sehingga hal ini perlu diperbaiki.
2. Efisiensi yang telah dilaksanakan secara efektif sehingga muncul sisa penyerapan anggaran/ SILPA.

**Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Dinas Peternakan dan Perikanan**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	388.902.000	462.380.500	118,89
2	2021	472.812.000	552.199.500	116,79
3	2022	548.185.000	608.855.000	111,07
4	2023	1.310.000.000	782.552.000	59,74
5	2024	855.000.000	813.353.350	95,13

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	10.925.462.577,20	10.651.993.888,00	9.802.752.260,00	9.852.352.607,00	-	10.552.555.271,00	10.091.383.434,07	9.209.293.553	9.516.748.262,00	-	96,59	94,74	93,95	96,59	-3,32	67,78
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	176.853.000,00	321.327.650,00	561.366.200,00	1.073.518.000	289.492.836,00	174.352.905,00	315.337.463,00	554.165.848,00	1.020.095.700	273.650.950,00	98,59	98,14	98,72	95,02	94,53	30,97	-1,22
3	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	1.087.721.800,00	2.328.590.610,80	707.743.500,00	574.904.600	335.000.000,00	1.040.251.940,00	2.070.326.717,95	693.813.221,00	561.171.226,0	290.416.932,00	95,64	88,91	98,03	97,61	86,69	-43,37	-0,45
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	NA	15.069.000,00	3.999.800	9.960.000,00	-	NA	14.961.000,00	3.964.800,0	9.760.000,00	-	#VALUE!	99,28	99,12	97,99	37,78	-0,65
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	NA	369.973.000,00	453.435.400	28.991.733,00	-	NA	365.409.000,00	445.168.660,0	28.545.500,00	-	#VALUE!	98,77	98,18	98,46	-35,52	-0,15
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	1.302.244.025,00	1.207.563.400,00	1.826.949.500	1.003.248.165,00	-	1.167.279.788,00	1.148.581.251,95	1.450.881.346,00	919.370.177,00	-	89,64	95,12	79,42	91,64	-0,35	1,67
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	1.496.754.340,00	1.731.174.012,00	30.465.500,00	4.940.100.020,00	-	1.443.271.090,00	1.612.563.154,00	23.570.000,00	4.806.325.960,00	-	96,43	93,15	77,37	97,29	5.344,27	1,80
8	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	-	1.865.837.920,00	1.905.986.650,00	434.076.050,00	2.498.182.455,00	-	1.813.668.090,00	1.628.281.629,00	377.648.422,00	2.371.156.987,00	-	97,20	85,43	87,00	94,92	133,48	-0,39
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	NA	41.000.000,00	10.000.000,00	7.499.720,00	-	NA	38.081.000,00	9.549.000,00	7.497.940,00	-	#VALUE!	92,88	95,49	99,98	-50,31	3,75
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	20.800.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00	4.999.960,00	-	20.646.500,00	4.200.000,00	2.999.840,00	4.999.900,00	-	99,26	100,00	62,11	100,00	-20,43	7,95
11	Program penyuluhan pertanian	-	244.780.000,00	367.060.000,00	243.232.000,00	113.187.404,00	-	239.845.600,00	362.028.153,00	216.472.508,00	99.844.126,00	-	97,98	98,63	89,00	88,21	-12,42	-3,33

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Capaian Anggaran  
Dinas Peternakan dan Perikanan**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pendapatan	472.812.000,00	548.185.000,00	1.310.000.000,00	855.000.000,00	552.199.500,00	608.855.000,00	782.552.000,00	813.353.350,00	116,7905	111,0674	59,73679	95,12905	55,74	163,1
2	Belanja	18.724.565.165,00	17.563.129.650,00	14.458.163.110,00	19.167.458.800,00	17.815.534.069,95	16.513.467.691,02	13.320.815.055,00	18.328.316.734,00	95,14525	94,02349	92,13352	95,62205	2,9	3,65
	Belanja Operasi	13.510.496.660,00	16.358.797.650,00	13.907.138.010,00	15.197.553.556,00	12.820.341.442,00	15.356.572.373,14	12.820.975.055,00	14.475.423.889,00	94,89171	93,87348	92,18989	95,24838	5,12	5,39
	Belanja	5.214.068.505,00	1.204.332.000,00	551.025.100,00	3.969.905.244,00	4.995.192.627,95	1.156.895.317,88	499.840.000,00	3.852.892.845,00	95,80221	96,06116	90,71093	97,05251	163,1	179,08

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



Berdasarkan tabel perkembangan anggaran dan realisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2020–2024 dapat ditarik beberapa kesimpulan. Secara umum, tren anggaran dan realisasi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi relatif terkendali. Pada sebagian besar tahun, realisasi anggaran mendekati bahkan melebihi target, yang ditunjukkan dengan rasio realisasi terhadap anggaran di atas 100% pada tahun 2020–2022. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Pada tahun 2024 realisasi mulai membaik dengan capaian 95,13%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika eksternal, keterbatasan sumber daya, serta perubahan prioritas kebijakan.

Secara rata-rata, pertumbuhan anggaran dan realisasi menunjukkan arah yang positif meskipun belum sepenuhnya stabil. Ke depan, dibutuhkan strategi penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta sinkronisasi antar program agar capaian realisasi lebih konsisten, sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan di bidang peternakan dan perikanan. Penetapan kelompok sasaran didasarkan pada analisis kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang ada di masyarakat, yang selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Peternakan meliputi:

1. Internal pegawai di lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan yang terdiri dari seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas;
2. Nelayan yang terdiri dari nelayan laut dan nelayan Perairan Umum Darat (PUD);



3. Pembudidaya ikan yang terdiri pembudidaya ikan konsumsi maupun non konsumsi;
4. Peternak;
5. Pelaku usaha peternakan dan perikanan, yang terdiri dari pelaku usaha pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk peternakan dan perikanan;
6. Masyarakat sebagai konsumen produk hewani dan ikan, dalam memberikan jaminan keamanan, mutu dan ketersediaan produk hasil peternakan dan perikanan.

#### **2.1.5 Mitra**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan strategis di sektor peternakan dan perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Adapun mitra kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, antara lain:

1. Mitra kerja unsur internal dalam rangka pemberian pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi:
  - a. Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 10 (sepuluh) orang;
  - b. Petugas Inseminator Buatan dalam rangka pemberian layanan Inseminasi Buatan (IB) sejumlah 53 petugas yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar.
2. Mitra kerja unsur eksternal dalam rangka mendukung pemberian layanan Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi:
  - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penyediaan bantuan sarana-prasarana, serta pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah Kabupaten Blitar;
  - b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung penyelarasan program kesehatan hewan, reproduksi ternak, penyediaan bibit/benih ternak unggul, serta fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular;
  - c. Bappeda Litbang dalam rangka perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di Dinas Peternakan dan Perikanan;



- d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka ketersediaan dan keamanan pangan asal hewan;
- e. Dinas Kesehatan dalam rangka pengawasan zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pengawasan perizinan di bidang Peternakan dan Perikanan;
- g. Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset menjadi mitra dalam penelitian dan inovasi;
- h. Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Blitar sebagai mitra pendataan populasi ternak.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja**

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dinas Peternakan dan Perikanan sejak di tetapkannya belum terdapat dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja.

#### **2.1.7 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Peternakan Dan Perikanan**

Kerja sama Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tentang Kerja Sama Pengembangan Produk Unggulan Bidang Peternakan dan Perikanan Nomor T/662.02/1/409.28.3/PKS/2024;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Bima tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Komoditas Jagung dan Telur Nomor T/662.02/2/409.28.3/PKS/2024.



## 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah merupakan cerminan dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mengurangi efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran layanan tersebut. Permasalahan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam sistem pelayanan. Berdasarkan identifikasi permasalahan di sektor perikanan dan peternakan Kabupaten Blitar, terdapat beberapa isu pokok yang perlu mendapatkan perhatian serius sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah**

NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
1	Produksi perikanan tangkap belum stabil dan cenderung fluktuatif.	Fluktuasi produksi perikanan tangkap akibat perubahan cuaca ekstrem	Menurunnya ketersediaan ikan di Perairan Umum Darat karena adanya <i>flushing</i> setiap tahun dan <i>illegal fishing</i>
		Belum optimalnya pemberdayaan nelayan kecil akibat kurangnya pendampingan yang berkelanjutan, serta keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap	Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan teknis maupun keterampilan dalam penerapan teknologi produksi terutama dalam pengembangan produksi garam
			Pemasaran hasil olahan garam masih kalah dengan hasil produksi garam dari pantai utara
			Masih banyaknya kelembagaan nelayan dengan kelas pemula, sehingga memerlukan pembinaan intensif
			Belum adanya asuransi jiwa terhadap nelayan
			Terbatasnya fasilitasi akses permodalan bagi nelayan
		Kurang memadainya infrastruktur penangkapan laut	Keterbatasan fasilitas pelabuhan, khususnya area labuh yang sudah penuh dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah armada, sehingga menghambat kelancaran operasional dan pelayanan pelabuhan.



NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
			Adanya penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan
			Penurunan daya saing perikanan budidaya karena rata-rata masih di pasar tradisonal
			Terbatasnya fasilitasi akses permodalan bagi pembudidaya ikan
		Biaya produksi tidak dapat mengimbangi harga jual ikan	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor untuk pakan
		Produksi perikanan non konsumsi/hias cenderung mengalami penurunan	Permintaan pasar terhadap ikan hias mengalami tren penurunan sehingga pembudidaya mengurangi produksi ikan hias
			Fluktuasi harga ikan di pasar
3	Rendahnya pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Masih rendahnya pelaku usaha perikanan yang patuh	Maraknya illegal fishing yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, di mana kewenangan pemerintah kabupaten terbatas hanya pada sosialisasi, sedangkan penindakan menjadi wewenang pemerintah provinsi yang belum optimal dijalankan
			Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pengolahan terhadap pentingnya legalitas usaha
			Belum optimalnya pendampingan teknis terkait penerapan standar produksi garam
			Rendahnya pembudidaya ikan yang memiliki izin
4	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produk olahan hasil perikanan masih rendah, pasar belum menjangkau wilayah luas	Akses promosi dan pemasaran masih terbatas di pasar lokal
			Kurang variatifnya produk olahan perikanan yang menjadi daya tarik pembeli
5	Belum optimalnya penyediaan sarana peternakan	Ketersediaan pakan yang masih banyak tergantung pabrikan sehingga pakan masih mahal	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor untuk pakan ternak
		Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging)	Ketidakmerataan akses pasar, yang mengakibatkan peternak kecil kesulitan untuk bersaing dengan peternak besar dalam hal kualitas harga dan volume produksi



NO (1)	MASALAH POKOK (2)	MASALAH (3)	AKAR MASALAH (4)
			Perlunya peningkatan kapasitas bagi petugas Inseminator dalam menunjang penyediaan bibit ternak
			Perlunya peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pakan ternak
6	Terbatasnya prasarana pertanian yang layak fungsi.	Belum optimalnya produksi peternakan karena minimnya penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan	Perlunya optimalisasi Rumah Pemotongan Hewan baik RPH dan RPU agar dapat mengakomodir seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar
			Perlunya optimalisasi operasional Pasar Hewan Terpadu
			Minimnya Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Kabupaten Blitar sehingga tidak dapat menjangkau seluruh populasi ternak di Kabupaten Blitar
7	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum optimal	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya	Sistem surveilans dan deteksi dini penyakit hewan belum berjalan efektif.
			Rendahnya kesadaran dan kepatuhan peternak dalam melaporkan kasus penyakit hewan
		Belum optimalnya penerapan persyaratan teknis dalam lalu lintas hewan dan produk hewan	Masih adanya mobilitas hewan dan produk hewan tanpa dokumen resmi
8	Masih banyaknya peternak belum memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam pengelolaan usaha ternak	Masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan teknis kepada unit usaha terkait penerapan standar kesejahteraan hewan.	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas
			Perlunya diversifikasi produk peternakan
		Pengelolaan limbah peternakan belum optimal sehingga mencemari lingkungan	Perlunya pengelolaan limbah sektor peternakan
9	Belum optimalnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum optimalnya penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Ketentuan	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
			Kerusakan asset akibat frekuensi penggunaan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan hanya bersifat formalitas tanpa analisis mendalam
			Arsip mengalami kerusakan akibat tidaknya fasilitas penyimpan atau ruangan arsip sesuai dengan standar ketentuan
			Belum adanya tenaga arsiparis dalam pengelolaan arsip

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

### 2.3 Isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2026. Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan.



Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan**

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Fluktuasi produksi perikanan tangkap akibat perubahan cuaca ekstrem	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap
2	Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Belum optimalnya pemberdayaan nelayan kecil akibat kurangnya pendampingan yang berkelanjutan, serta keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap	Tingkat kemiskinan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pelatihan (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
3	Potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar dengan luas perairan laut sebesar 126.672 km <sup>2</sup> dengan 1 (satu) pelabuhan perikanan di Kabupaten Blitar.	Kurang memadainya infrastruktur penangkapan laut (jumlah dan kapasitas pelabuhan yang masih kurang)	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	<b>Persaingan Sumber Daya Alam</b> Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap
4	Potensi sumber daya perikanan budidaya di perairan wilayah kabupaten	Belum optimalnya produksi perikanan konsumsi, produksi cenderung mengalami titik jenuh	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan pembudidaya ikan dan optimalisasi produksi pakan mandiri
5	Kabupaten Blitar dikenal sebagai sentra budidaya ikan hias, khususnya ikan koi	Produksi perikanan non konsumsi/hias cenderung mengalami penurunan	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan daya saing produk ikan hias melalui promosi, digitalisasi pemasaran, dan peningkatan kualitas produksi
6	Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya perairan umum (sungai, waduk)	Penurunan jumlah stok ikan karena adanya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin	Penguatan kelembagaan nelayan dan penataan izin di wilayah perairan darat	Peningkatan pengawasan perikanan



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
			kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	g persaingan memperebutkan SDA	meningkat		
7	Potensi perikanan budidaya air tawar dan perikanan tangkap di Kabupaten Blitar cukup besar	Produk olahan hasil perikanan masih rendah, pemasaran belum menjangkau wilayah luas	Mulai bergesernya struktur perekonomian dari pertanian ke industri pengolahan, perdagangan dan jasa (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Hilirisasi perikanan dan penguatan akses pasar hasil perikanan
8	Blitar sebagai sentra produsen telur	Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging)	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan rantai pasok produk peternakan
9	Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya	-	Ancaman wabah penyakit hewan lintas negara	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
10	Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Pengelolaan limbah peternakan belum optimal sehingga mencemari lingkungan	Bau limbah/kotoran ternak dan peningkatan populasi lalat akibat usaha peternakan yang tidak dikelola dengan baik (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip	Pengelolaan Limbah Peternakan yang Berkelanjutan



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
						pembang unan berkelanj utan	
11	Kabupaten Blitar sebagai pemasok telur tertinggi di Jawa Timur	Kurangnya pasokan jagung untuk pakan ternak	Masih rendahnya harga jual pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing)
12	Hasil Rilis Sensus Pertanian 2023, komoditas yang banyak diusahakan di Kabupaten Blitar adalah Kambing, Sapi dan Domba	Ketersediaan pakan yang masih banyak tergantung pabrikan sehingga pakan masih mahal	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	
13	Distribusi PDRB sub sektor peternakan cukup besar dengan nilai 12,4%	Hilirisasi produk peternakan belum berkembang	Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini (KLHS RPJMD Kabupaten Blitar)	Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Hilirisasi peternakan dan pengembangan kapasitas peternak

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



Berdasarkan tabel analisis isu strategis di atas terdapat 7 (tujuh) rumusan isu strategis pada Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan infrastruktur perikanan tangkap;
2. Pemberdayaan pembudidaya ikan dan optimalisasi produksi pakan mandiri;
3. Penguatan daya saing produk ikan hias melalui promosi, digitalisasi pemasaran, dan peningkatan kualitas produksi;
4. Peningkatan pengawasan perikanan;
5. Hilirisasi perikanan dan penguatan akses pasar hasil perikanan
6. Penguatan rantai pasok produk peternakan;
7. Optimalisasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
8. Pengelolaan limbah peternakan yang berkelanjutan;
9. Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing);
10. Hilirisasi peternakan dan pengembangan kapasitas peternak.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar mencerminkan aspirasi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diutarakan dalam proses pemilihan. Rumusan visi Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 yaitu:

#### **“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”**

Visi Kabupaten Blitar mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berlimpah. Semangat "Blitar Kawentar" menggaris bawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong.

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, serta RPJPN Nasional 2025-2045. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, RPJMD Kabupaten Blitar harus mencerminkan hubungan yang jelas dengan RPJPD kabupaten dan RPJPN tingkat nasional. Selain itu, hubungan spesifik antara RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Blitar juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan dokumen perencanaan ini.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025-2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif, Berpendidikan yang Baik, Berdaya



Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas;

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri;
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat;
4. Menjamin ketentraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbudaya dan Berbudi Pekerti yang luhur;

Untuk mendukung keberhasilan visi misi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung ketercapaian misi 2 "*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri*" sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan, dirumusan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu: "*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Peternakan dan Perikanan*" dengan indikator tujuan sebagai berikut :

- a. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Indikator ini menunjukkan besarnya peran sektor perikanan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar.

- b. Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Indikator ini menggambarkan tingkat sumbangan sub sektor peternakan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar.

Dari indikator tersebut dapat diketahui kontribusi pembangunan baik sektor perikanan maupun sub sektor peternakan terhadap PDRB di wilayah Kabupaten Blitar.



### 3.2 Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan

Dalam mencapai Tujuan Renstra “*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Peternakan dan Perikanan*” , Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan hasil yang dicapai, serta kemampuan Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

b. Meningkatnya produksi hasil perikanan

Sasaran ini menggambarkan upaya strategis Dinas Peternakan dan Perikanan dalam meningkatkan ketersediaan ikan di Kabupaten Blitar dengan indikator sasaran Persentase peningkatan produksi perikanan, yang dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

1) Perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil kegiatan penangkapan ikan dan biota perairan lainnya yang dilakukan secara langsung dari habitat alaminya, baik di perairan laut maupun perairan darat (sungai, danau, waduk, dan rawa).

2) Perikanan budidaya (konsumsi)

Produksi perikanan budidaya (konsumsi) merupakan produksi ikan yang mencakup budidaya di tambak, kolam, mina padi dan jaring apung di perairan tawar.

3) Perikanan budidaya (non konsumsi/hias)

Perikanan budidaya non konsumsi merupakan kegiatan budidaya ikan dan organisme akuatik lainnya yang tidak ditujukan untuk keperluan konsumsi langsung.

c. Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan

Sasaran ini menggambarkan upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil peternakan guna memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat dengan indikator sebagai berikut:

1) Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan

Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan produksi komoditas peternakan dari tahun ke tahun. Persentase peningkatan produksi dihitung dengan membandingkan volume produksi pada tahun



berjalan terhadap tahun sebelumnya, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Produksi daging

Produksi daging merupakan hasil dari kegiatan pemeliharaan dan pemotongan ternak yang menghasilkan daging segar sebagai komoditas utama konsumsi protein hewani masyarakat. Komoditas ini berasal dari berbagai jenis ternak seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, dan puyuh yang dibudidayakan melalui sistem peternakan rakyat maupun skala komersial.

b) Produksi telur

Produksi telur merupakan hasil kegiatan budidaya unggas petelur, terutama ayam buras, ayam ras, itik, entok dan puyuh yang menghasilkan telur sebagai komoditas pangan hewan.

c) Produksi susu

Produksi susu merupakan hasil dari kegiatan pemeliharaan ternak perah, terutama sapi perah dan kambing perah, yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan susu segar sebagai bahan pangan bergizi tinggi.

2) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Indikator ini menghitung proporsi wilayah administratif (desa/kelurahan) yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), yaitu yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan perdagangan ternak. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan vaksinasi, surveilans, dan pengobotan hewan.

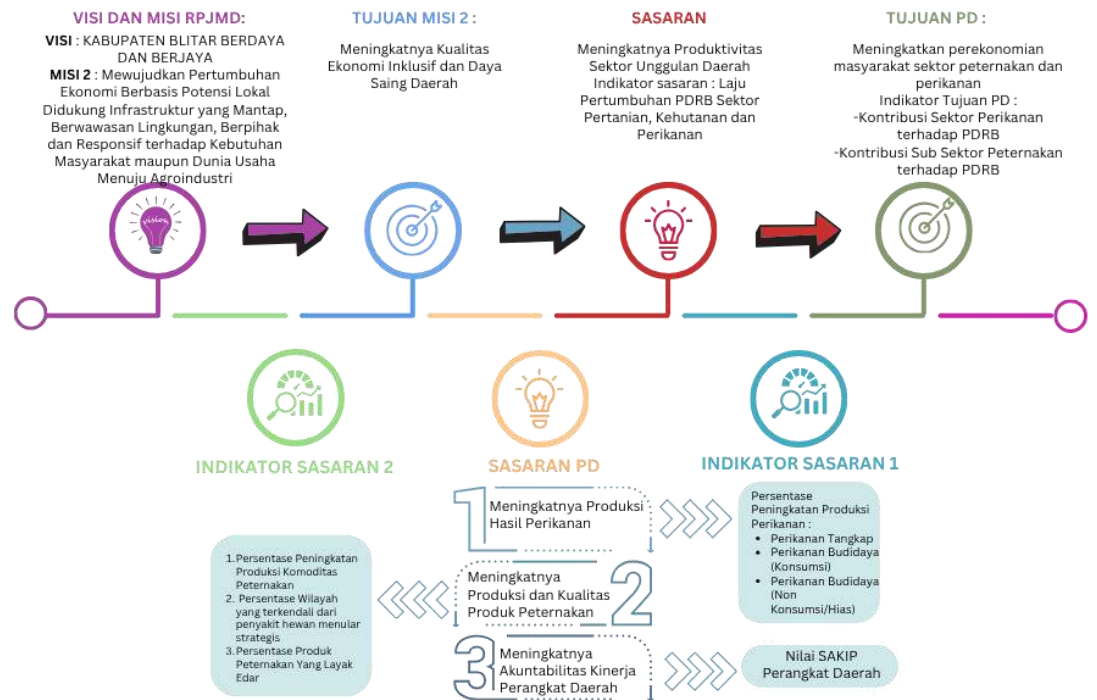
3) Persentase produk peternakan yang layak edar

Indikator ini mengukur proporsi produk peternakan yang memenuhi standar kelayakan untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat, baik dari segi keamanan pangan, mutu, sanitasi, dan persyaratan perizinan.



## KERANGKA KETERKAITAN

SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



**Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

Gambar 3.1 menunjukkan kesinambungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan dokumen strategis organisasi perangkat daerah (Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan). Setiap komponen dari visi hingga sasaran saling mendukung untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berbasis kinerja.

Dengan penyusunan tujuan dan sasaran yang jelas keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dinilai secara objektif dan transparan.

Adapun uraian lengkap mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, disajikan secara rinci dalam Tabel 3.1 berikut:



**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2025 – 2029**

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah (sasaran 4 misi 2)	Meningkatkan perekonomian masyarakat sektor peternakan dan perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan PDRB terhadap	%	Besarnya sumbangan atau andil dari kegiatan usaha di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, maupun pemasaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar. <b>Sumber data : Rilis BPS</b>	4,36	4,37	4,39	4,42	4,46	4,54	4,59	4,59
				Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	Besarnya sumbangan dari kegiatan ekonomi di bidang peternakan, seperti usaha budidaya ternak, produksi hasil ternak (daging, susu, telur, dan produk olahan ternak) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dalam periode waktu tertentu.	12,6	12,7	12,80	12,9	13,1	13,3	13,5	13,5



NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						<b>Sumber data : Rilis BPS</b>								
			1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan. <b>Sumber data : Inspektorat</b>	73,40	73,6	73,8	74,1	74,5	74,8	75,0	75
			2. Meningkatnya produksi hasil perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan			-5,77							
				- Perikanan tangkap	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n- produksi tahun n-	-12,74	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3



NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1)/produksi tahun n-1 X 100								
				- Perikanan budidaya (konsumsi)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	2,37	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	15
				- Perikanan Budidaya (Non Konsumsi/Hias)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6



NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			3. Meningkatnya produksi dan kualitas peternakan	1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%										
				- Daging	%	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,92	3,95	4	4	4	4	4	4	23,95
				- Telur	%	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,35	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	20,9



NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				- Susu	%	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	8,40
				2. Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar <b>Sumber data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah desa yang terkendali/jumlah total desa X 100	92,3	93	94	95	96	97	98	98



NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	14	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				3. Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	%	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi <b>Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi</b> <b>Perhitungan:</b> Jumlah produk layak edar/produk yang diawasi X 100	97,9	98	98	98	98	98	98	98	98



### 3.3 Arah Kebijakan

#### 3.3.1 Pentahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Dalam menghadapi dinamika lingkungan yang semakin kompleks, baik pada level global, nasional, maupun regional, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyusun strategi bertahap untuk menjawab permasalahan serta isu strategis yang ada. Strategi ini berorientasi pada pencapaian peningkatan produksi peternakan dan perikanan, pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), serta penyediaan produk peternakan dan perikanan yang layak edar dan aman dikonsumsi masyarakat.

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan**

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknik penangkapan ramah lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Pemberdayaan nelayan dalam pengolahan pascapanen	Integrasi pasar dan digitalisasi pemasaran	Terbentuknya ekosistem usaha perikanan tangkap nelayan kecil yang mandiri dan berdaya saing
Pemberdayaan pembudidaya ikan dan penguatan kelembagaan kelompok	Pelatihan manajemen usaha budidaya dan teknik pembuatan pakan mandiri (self-mixing)	Pemasaran digital produk ikan konsumsi dan ikan hias melalui e-commerce	Penguatan jejaring pemasaran ikan hias	Terwujudnya pembudidaya ikan konsumsi yang mandiri, efisien, dan berdaya saing
Pelatihan dasar manajemen usaha, dan pengemasan produk olahan	Peningkatan mutu dan daya saing produk olahan perikanan	Fasilitasi akses pembiayaan dan kredit usaha bagi UMKM olahan ikan	Penguatan branding dan promosi produk olahan perikanan khas Blitar	Ekspansi pasar hasil perikanan
Pelatihan formulasi pakan menggunakan bahan baku lokal	Pelatihan formulasi pakan ternak berkelanjutan	Peningkatan kapasitas SDM kelompok ternak dalam manajemen usaha pakan	Peningkatan kapasitas produksi pakan dengan peralatan yang lebih modern	Pencapaian kemandirian kelompok ternak dalam penyediaan pakan mandiri
Operasionalisasi Rumah Potong Hewan Unggas/RPU	Fasilitasi kerja sama antara RPU dengan pelaku usaha unggas, pedagang, dan konsumen besar	Relokasi RPH di wilayah strategis untuk memperluas akses layanan	Penguatan Branding Produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	Hilirisasi produk peternakan
Sosialisasi masif kepada peternak mengenai biosekuriti, pencegahan penyakit hewan	Peningkatan layanan dan Pencegahan penyakit hewan	Penguatan Respon Cepat dan Sistem Informasi	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait zoonosis dan konsumsi pangan asal hewan yang aman	Peningkatan kemandirian daerah melalui ketersediaan SDM veteriner profesional, laboratorium terakreditasi, serta layanan kesehatan hewan yang merata
Identifikasi potensi komoditas peternakan (daging, telur, susu) yang memiliki peluang hilirisasi	Pendampingan teknis bagi kelompok ternak dalam pengolahan produk hasil peternakan	Pengembangan Pasar dan Diversifikasi Produk	Fasilitasi kelompok ternak untuk memanfaatkan platform e-commerce dan marketplace nasional	Hilirisasi peternakan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi



TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus memperkuat kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Blitar.

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

### 3.3.2 Arah Kebijakan Renstra

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menjawab isu-isu strategis di sektor peternakan dan perikanan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan ini disusun sebagai kerangka operasional guna menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah implementatif yang mampu mendorong peningkatan produksi, kesejahteraan pelaku usaha, serta ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini juga mempertimbangkan potensi, permasalahan aktual, serta tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh subsektor peternakan dan perikanan.

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai upaya sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan sektor peternakan dan perikanan sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Tujuan tersebut mencakup peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan pelaku utama di bidang peternakan dan perikanan. Dalam rangka menjabarkan tujuan tersebut menjadi sasaran yang terukur dan dapat diimplementasikan, diperlukan strategi yang tepat dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, potensi lokal, serta tantangan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode rencana strategis, agar intervensi yang dilakukan lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk periode 2025-2029 dapat terlihat pada table di bawah ini:



**Tabel 3.3 Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan perekonomian masyarakat sektor peternakan dan perikanan		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan nelayan kecil melalui penguatan kapasitas nelayan, diversifikasi usaha, penguatan kelembagaan serta penyediaan akses permodalan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
				Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap melalui fasilitasi pengadaan alat tangkap ramah lingkungan.
				Penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan,
			Peningkatan produksi perikanan budidaya baik konsumsi dan non konsumsi	Peningkatan kapasitas SDM perikanan melalui pelatihan teknis, dan penyuluhan
				Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
				Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap program permodalan dan bantuan pemerintah
				Fasilitasi penyediaan benih ikan, dan sarana produksi serta optimalisasi Unit Pembenihan Ikan
				Optimalisasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan penyakit ikan serta monitoring kualitas air dan lingkungan perairan budidaya



<b>VISI (RPJMD)</b>	: <b>Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	: <b>Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perikanan	Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan regulasi kepada pelaku usaha perikanan untuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan penerapan usaha yang berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Fasilitasi pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan, penerapan standar mutu dan keamanan pangan, serta pendampingan usaha kecil menengah (UKM) olahan perikanan.
			Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Penguatan pemasaran hasil perikanan melalui digitalisasi dan promosi
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Peningkatan kualitas mutu bibit, obat dan pakan ternak	Fasilitasi penyediaan bibit unggul, pakan berkualitas, dan obat ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak
			Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing)
		Peningkatan prasarana peternakan dalam mendukung produktivitas dan keamanan pangan asal hewan	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana peternakan seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Pasar Hewan, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan, menjamin kesehatan dan keamanan pangan asal hewan, serta mendukung peningkatan produktivitas



<b>VISI (RPJMD)</b>	: <b>Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	: <b>Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Meningkatkan status kesehatan hewan dan kualitas produknya	Penjaminan kesehatan hewan melalui penguatan surveilans, tindakan pencegahan, pengembangan laboratorium kesehatan hewan serta penyediaan layanan medik veteriner yang cepat dan tepat
			Penerapan standar sanitasi dan keamanan pangan (sertifikasi NKV) pada produk peternakan
		Terwujudnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Respons cepat terhadap bencana alam maupun wabah penyakit hewan untuk meminimalisir kerugian peternak
		Meningkatkan kepatuhan usaha pelaku sektor peternakan	Pengawasan berkala terhadap Klinik Hewan, Praktik Dokter Hewan, dan tenaga kesehatan hewan untuk memastikan kepatuhan
		Meningkatkan pendampingan usaha sektor peternakan	Pengembangan unit usaha hilirisasi produk peternakan (olahan daging, susu, telur)
			Penguatan kelembagaan kelompok peternak dan akses pembiayaan (KUR, koperasi peternakan)
			Pengembangan teknologi pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai tambah

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

### 3.3.3 Lokus Renstra

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan sektor peternakan dan perikanan, penetapan lokus kegiatan difokuskan di Kabupaten Blitar dengan memperhatikan kecamatan dengan potensi unggulan peternakan dan perikanan. Lokus ini menjadi dasar intervensi program sehingga sesuai dengan karakteristik wilayah, sentra produksi, dan kebutuhan masyarakat.

### 3.3.4 Arah kebijakan Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten



Blitar bukan merupakan perangkat daerah pengampu langsung Standar Pelayanan Minimal (SPM).



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terdiri 11 (sebelas) yang terdiri:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian

#### **4.2 Kegiatan**

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam menjalankan 11 (sebelas) program, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Daftar Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan**

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		9	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		10	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI)
		11	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	12	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		13	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan



NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
4	Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau , Waduk , Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
5	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
		16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		17	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
6	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18	Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		19	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		20	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
		21	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
7	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22	Pembangunan Prasarana Pertanian
8	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VeterinerPertanian	23	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
		24	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		25	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		26	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		27	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
9	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	28	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
10	Perizinan Usaha Pertanian	29	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		30	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		31	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
11	Program Penyuluhan Pertanian	32	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>SUB OUTPUT</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan kesekretariatan untuk mendukung Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
											Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
											Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
								Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
											Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
											Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
											Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
											Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
								Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
											Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
											Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
											Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
											Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
											Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
											Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
											Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelola penangkapan ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia
											Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
								Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ kota	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
											Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Dana, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
											Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
								Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
								Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Berkurangnya sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
							Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
											Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya
											Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
											Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
											Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
											Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
											Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
					Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota
											pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
											Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi		
											Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
											Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
					Meningkatkan pengolahan produk perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan hasil perikanan	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Optimalisasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha yang dibangun dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
								Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak	Terlaksananya Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis							Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
				Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar				Meningkatnya kualitas/ mutu bibit/pakan yang beredar	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/pakan ternak yang diawasi	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Optimalisasi Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang diawasi	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Hijauan Pakan Ternak di Wilayah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha pakan ternak yang dikendalikan dan diawasi	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
					Meningkatkan pemanfaatan prasarana peternakan yang ada	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	Optimalisasi penyediaan prasarana peternakan yang layak fungsi	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun, dipelihara dan beroperasi	Terbangun, terhabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
											Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
											Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terbangun, ter rehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara
					Meningkatkan status kesehatan hewan dan kualitas produksinya	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kesehatan hewan yang dijamin	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
							Jumlah unit usaha peternakan yang terekomendasi NKV				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan
											Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
								Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang diterbitkan	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Optimalisasi Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium
											Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
								Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
											Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi
								Optimalisasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan
					Terwujudnya Pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanggulangan Bencana Non alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Meningkatkan pengembangan usaha peternakan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Fasilitasi izin usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi
								Fasilitasi Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Peternakan Kab. Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	OUTPUT	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
					Meningkatkan penyuluhan / pendampingan usaha peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan peternak terampil	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
											Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya



### **4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif**

Sub bab ini memuat uraian mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan selama periode perencanaan tahun 2025–2030, sebagai bentuk operasionalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada ketentuan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat hasil pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang ditetapkan mencerminkan prioritas pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan, dengan fokus pada peningkatan produksi, mutu, dan daya saing komoditas; penguatan ketahanan pangan asal hewan dan ikan; pengendalian penyakit hewan dan kesehatan ikan; serta pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha.

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan pendanaan tahunan selama lima tahun ke depan. Rencana pendanaan dirancang secara realistis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mengupayakan potensi pembiayaan dari sumber lain seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Penyusunan struktur program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efisien dan akuntabel. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan, seperti tabel berikut:



**Tabel 4.3**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan				Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	Besarnya sumbangan atau andil dari kegiatan usaha di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, maupun pemasaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar. <b>Sumber data : Rilis BPS</b>	4,36	4,37	4,39		4,42		4,46	4,54		4,59		4,59			
				Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRE	%	Besarnya sumbangan dari kegiatan ekonomi di bidang peternakan, seperti usaha budidaya ternak, produksi hasil ternak (daging, susu, telur, dan produk olahan ternak) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dalam periode waktu tertentu. <b>Sumber data : Rilis BPS</b>	12,6	12,7	12,80		12,9		13,1	13,3		13,5		13,5			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan	73,4	73,60		73,80		74,10		74,50		74,80		75,00		75	
		3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80	80	9.931.0 15.210	81	10.549.61 2.415,07	82	10.655.10 8.539,22	83	10.761.65 9.624,61	84	10.869.27 6.220,86	85	10.977.96 8.983,07	85	53.813.6 25.783
		3.25.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun oleh perangkat daerah dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta memenuhi ketentuan format dan substansi	100	100	6.920.00 0	100	52.945.585	100	53.475.040	100	54.541.25 5	100	55.600.00 0	100	56.156.00 0,00	100	272.717. 880
		3.25.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen tertulis, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi program dan kegiatan di tingkat daerah.	2	3	1.800.00 0	7	3.000.000	7	3.030.000	7	3.090.000	7	3.150.000	7	3.181.500, 00	38	15.451.5 00



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 1.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dokumen tertulis yang disusun secara periodik (biasanya tahunan) untuk menilai dan mengukur capaian kinerja dari suatu perangkat daerah atau instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan program- program yang telah ditetapkan dalam perencanaan Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	5.120.00 0	11	5.632.000	11	5.688.320	11	5.800.000	11	5.900.000	11	5.959.000	60	28.979.3 20
		3.25.01.2.0 1.0008		Penyelengaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berit a Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulka n, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	1	3.000.000	1	3.030.000	1	3.090.000	1	3.150.000	1	3.181.500	4	15.451.5 00



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 1.0009		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	Jumlah data yang telah diperoleh dan diverifikasi dari berbagai sumber yang relevan dalam lingkup perangkat daerah, yang mencakup data statistik sektor tertentu Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	134	41.313.585	134	41.726.720	134	42.561.255	134	43.400.000	134	43.834.000	190	212.835. 560
		3.25.01.2.0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	8.413.97 6.014	100	8.472.126. 655	100	8.627.517. 922	100	8.677.018. 370	100	8.745.324. 220,86	100	8.832.777. 463	100	43.354.7 64.631
		3.25.01.2.0 2.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	70	8.391.13 6.314	87	8.446.252. 655	87	8.601.385. 182	87	8.650.618. 369,61	87	8.718.454. 220,86	87	8.805.638. 763	87	43.222.3 49.191
		3.25.01.2.0 2.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324	250	20.340.0 00	250	22.374.000	275	22.597.740	303	22.800.000	333	23.200.000	366	<b>23.432.00 0</b>	1776	114.403. 740



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 2.0007		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Rekonsiliasi Keuangan Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	4	3	1.000.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.000.200
		3.25.01.2.0 2.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	14	14	1.499.500	14	3.500.000	14	3.535.000	14	3.600.000	14	3.670.000	14	<b>3.706.700</b>	84	18.011.700
		3.25.01.2.0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Kegiatan administrasi umum pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	95	95	159.444.806	95	262.000.000	95	273.350.000	95	297.100.000	95	302.200.000	95	<b>305.222.000</b>	95	1.439.872.000
		3.25.01.2.0 6.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah paket komponen atau satuan elemen yang diperlukan untuk pemasangan instalasi listrik dan penerangan pada bangunan kantor, yang disediakan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	0	0	1	10.000.000	3	10.000.000	3	10.200.000	3	10.400.000	3	<b>10.504.000</b>	13	51.104.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.01.2.0 6.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Total jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam satu periode tertentu (misalnya tahunan) untuk mendukung kelancaran Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan operasional kantor.	3	3	18.106.1 50	5	40.000.000	5	41.000.000	5	41.800.000	5	42.000.000	5	42.420.000	28	207.220. 000
		3.25.01.2.0 6.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Total jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah untuk keperluan rumah tangga, baik untuk kebutuhan operasional dinas, bantuan sosial, atau pengadaan lainnya dalam satu periode tertentu.	-	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.400.000	1	20.800.000	1	21.008.000	5	102.208. 000
		3.25.01.2.0 6.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Total jumlah paket bahan logistik yang disediakan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam satu periode tertentu untuk mendukung operasional kantor Sumber data : Dinas	-	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.200.000	12	10.400.000	12	10.504.000	60	51.104.0 00



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.01.2.0 6.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Peternakan dan Perikanan	3	2	19.491.2 50	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.100.000	2	26.361.00 0	12	127.961. 000
		3.25.01.2.0 6.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen		-	0	0	12	2.000.000	12	2.000.000	12	20.400.000	12	20.800.000	12	21.008.00 0	60	66.208.0 00



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.01.2.0 6.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	115	100	121.847. 406	130	120.000.00 0	143	130.000.00 0	157	132.600.00 0	173	135.000.00 0	190	136.350.0 00	894	653.950. 000	
		3.25.01.2.0 6.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	0	0	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.400.000	1	15.700.000	1	15.857.00 0	5	77.107.0 00	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 6.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen yang terkait dengan implementasi dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di SKPD, yang mencakup pedoman, prosedur, kebijakan, dan dokumen lain yang mendukung keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan di SKPD tersebut	-	0	0	1	20.000.000	1	20.200.000	1	20.600.000	1	21.000.000	1	21.210.000	5	103.010.000
		3.25.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Persen	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah dan dinilai tepat sasaran, yaitu sesuai dengan kebutuhan, peruntukan, spesifikasi teknis, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	95	95	37.289.900	95	430.000.000	95	311.900.000	95	317.500.000	95	323.500.000	95	326.735.000	95	1.709.635.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 7.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	0	0	1	120.000.00 0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000. 000
		3.25.01.2.0 7.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	0	0	1	120.000.00 0	2	120.000.00 0	2	122.000.00 0	2	124.000.00 0	2	<b>125.240.0 00</b>	95	611.240. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 7.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	0	-	5	30.000.000	5	30.300.000	5	30.900.000	5	31.500.000	5	<b>31.815.000</b>	25	154.515. 000
		3.25.01.2.0 7.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	4	37.289.9 00	5	40.000.000	6	40.400.000	6	41.000.000	7	42.000.000	7	<b>42.420.000</b>	35	205.820. 000
		3.25.01.2.0 7.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0	0	1	100.000.00 0	1	101.000.00 0	1	103.000.00 0	1	105.000.00 0	1	<b>106.050.000</b>	5	515.050. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 7.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Total jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam satu periode tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, proyek, atau program lainnya. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	-	2	20.000.000	2	20.200.000	2	20.600.000	2	21.000.000	2	21.210.000	10	103.010.000
		3.25.01.2.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	90	90	1.197.861.490	90	952.540.175	90	1.005.065.577	90	1.024.600.000	90	1.044.652.000	90	1.055.098.520	90	5.081.956.272
		3.25.01.2.0 8.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Total jumlah laporan yang dihasilkan terkait dengan penyediaan layanan surat menyurat yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	12	12	2.309.250	1	2.540.175	1	2.565.577	1	2.600.000	1	2.652.000	1	2.678.520	17	13.036.272



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.01.2.0 8.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Total jumlah laporan yang dihasilkan terkait dengan penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam suatu periode tertentu.	12	12	175.904. 040	12	250.000.00 0	12	252.500.00 0	12	257.000.00 0	12	262.000.00 0	12	<b>264.620.0 00</b>	12	1.286.12 0.000
		3.25.01.2.0 8.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Total jumlah laporan yang mencatat penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah dalam periode tertentu.	12	12	1.019.64 8.200	12	700.000.00 0	12	750.000.00 0	12	765.000.00 0	12	780.000.00 0	12	<b>787.800.0 00</b>	12	3.782.80 0.000
		3.25.01.2.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam kondisi baik	Persen	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berada dalam kondisi baik, yaitu dapat digunakan sebagaimana mestinya, berfungsi sesuai peruntukanny a, dan memenuhi standar kelayakan operasional. Sumber data : Dinas	94	90	115.523. 000	90	320.000.00 0	90	323.200.00 0	90	329.100.00 0	90	335.000.00 0	90	<b>338.350.0 00</b>	90	1.645.65 0.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 9.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	0	0	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.500.000	1	52.000.000	1	52.520.000	1	256.520.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 9.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Total jumlah kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan operasional instansi atau kegiatan lapangan. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	3	5	108.317. 000	10	100.000.00 0	10	101.000.00 0	10	103.000.00 0	10	105.000.00 0	10	106.050.0 00	10	515.050. 000
		3.25.01.2.0 9.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah peralatan dan mesin yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah yang digunakan untuk keperluan operasional dan telah menjalani proses pemeliharaan yang diperlukan agar tetap berfungsi dengan baik. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	4	7.206.00 0	10	20.000.000	10	20.200.000	11	20.600.000	11	21.000.000	12	21.210.00 0	58	103.010. 000
		3.25.01.2.0 9.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah yang telah menjalani kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi untuk menjaga kualitas dan	1	0	0	2	100.000.00 0	2	101.000.00 0	2	103.000.00 0	2	105.000.00 0	2	106.050.0 00	10	515.050. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 9.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Unit	-	0	0	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	5	256.020. 000
		3.25.01.2.0 5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	-	100	0	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.800.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	309.030. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 5.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	0	0	10	20.000.000	10	20.200.000	10	20.600.000	10	21.000.000	10	21.210.000	50	103.010.000
		3.25.01.2.0 5.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	0	0	70	20.000.000	70	20.200.000	70	20.600.000	70	21.000.000	70	21.210.000	70	103.010.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	total jumlah individu atau peserta yang mengikuti bimbingan teknis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait dengan implementasi peraturan perundang- undangan. Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	70	20.000.000	70	20.200.000	70	20.600.000	70	21.000.000	70	21.210.000	70	103.010.000
			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan								-				-						-
	Meningkatnya produksi hasil perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan			-5,77														-



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				- Perikanan Tangkap	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b>  (Produksi tahun n- produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	-12,74	0,5	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	3	-



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				-Perikanan Budidaya (konsumsi)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Pernakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n- produksi tahun n- 1)/produksi tahun n-1 X 100	2,37	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		15	
				-Perikanan Budidaya (non konsumsi)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Pernakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n- produksi tahun n- 1)/produksi tahun n-1 X 100	0,02	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,6	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	Total produksi perikanan tangkap (Laut dan Perairan Umum Darat) dalam satu tahun berjalan Sumber Data : Dinas Pernakanan dan Perikanan	3.093,8 0	3.109	110.500. 000	3.125	110.644.72 1,50	3.140	521.826.25 0	3156	627.917.56 2,50	3172	734.313.44 0,63	3188	<b>741.029.1 12,66</b>	3188	2.735.73 1,087



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.03.2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	Nelayan/kelompok	12	30	22.880.000	30	23.000.000	30	115.000.000	30	126.500.000	30	129.000.000	30	130.173.900	180	523.673.900
		3.25.03.2.0 1.0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	2.880.000	1	3.000.000	1	15.000.000	1	16.500.000	1	16.800.000	1	16.952.880	6	68.252.880
		3.25.03.2.0 1.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	-	0	0	1	5.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	56.100.000	1	56.610.510	5	222.710.510
		3.25.03.2.0 1.0004		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	2	20.000.000	2	15.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	56.100.000	2	56.610.510	12	232.710.510



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	Nelayan	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan dalam bentuk pengembang an kapasitas, bantuan sarana dan prasarana, pendampingan usaha, atau fasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	202	90	80.000.0 00	110	77.644.722	170	311.826.25 0	260	392.917.56 3	280	<b>486.313.4 40,63</b>	305	<b>490.772.3 12,66</b>	1215	1.759.47 4.287
		3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencaharianny a melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	145	30	60.000.0 00	20	37.644.722	75	156.826.25 0	160	222.417.56 3	180	<b>275.563.4 41</b>	200	<b>278.104.4 87,66</b>	665	970.556. 462



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.03.2.0 2.0002		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembang annya adalah banyaknya lembaga/kelo mpok nelayan yang mendapat fasilitasi melalui pembinaan dan penguatan kelompok usaha Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	47	20	15.000.0 00	50	15.000.000	55	50.000.000	60	55.000.000	60	60.000.000	65	60.546.000	310	240.546. 000
		3.25.03.2.0 2.0003		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam penyaluran bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuhke mbangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	10	40	5.000.00 0	40	5.000.000	40	30.000.000	40	33.000.000	40	60.000.000	40	60.546.000	240	188.546. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.03.2.0 2.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	Jumlah penyediaan sarana prasarana pemberdayaan usaha nelayan berupa Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut, mesin kapal, alat penangkapan ikan ramah lingkungan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, fish finder, lampu, coolbox, dsb), Sarana keselamatan pelayaran (radio komunikasi, life jacket, alat pemadam kebakaran ringan (APAR), dsb) sesuai dengan kewenangan kab/kota. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	1	20.000.000	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	91.575.825	5	359.825. 825
		3.25.03.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	Ton	Jumlah produksi perikanan di TPI Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1.477,6 8	2070	5.120.00 0	2070	5.000.000	2132	60.000.000	2196	70.000.000	2262	77.000.000	2330	77.700.700 ,00	2376	289.700. 700



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.03.2.0 3.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah banyaknya layanan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka operasional TPI Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	5.120.000	1	5.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	77.000.000	1	77.700.700	1	289.700.700
		3.25.03.2.0 4	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	Unit Kapal	Pendaftaran secara resmi oleh pemilik atau pengguna kapal kepada instansi berwenang di bidang perikanan dalam satu tahun Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	46	34	2.500.000	34	5.000.000	36	35.000.000	38	38.500.000	40	42.000.000	42	42.382.200	44	162.882.200
		3.25.03.2.0 4.0002	Pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan untuk kapal perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	46	34	2.500.000	34	5.000.000	36	35.000.000	38	38.500.000	40	42.000.000	42	42.382.200	44	162.882.200
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	Ton	Jumlah produksi perikanan konsumsi pada tahun berjalan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	17.301,30	17.734	275.999.950	18.177	251.556.921,50	18.632	677.181.950,50	19.097	791.041.048,03	19.575	905.593.100,43	20.064	920.872.755,45	20.064	3.546.245.776



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	Ekor	Jumlah produksi perikanan non konsumsi pada tahun berjalan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	204.82 7.074	205.03 1.900		205.23 6.930	-	205.44 2.160	-	205.6 47.60	-	205.8 53.24	-	206.05 9.090	-	206.05 9.090	-	-
		3.25.04.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	Pembudidaya	Pembudidaya ikan skala kecil yang memperoleh bantuan atau intervensi pemberdayaan dari pemerintah daerah melalui program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan kesejahteraan mereka, yang meliputi pelatihan, pemberian sarana dan prasarana, serta akses pasar dan permodalan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	140	120	190.000.000	180	66.556.922	300	232.181.951	360	275.541.048	420	341.460.000	480	347.205.806	1900	1.262.945.726	
		3.25.04.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	7	4	180.000.000	4	44.056.921,50	10	173.181.950,50	12	200.641.048	14	258.600.000	16	262.945.472	60	939.425.392	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.04.2.0 2.0002		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelembagaan/ kelompok (Pembudidaya an Ikan yang melakukan pembudidayaa n ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari) yang difasilitasi pembentukan dan pengembang annya Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	5	4	7.500.00 0	6	10.000.000	8	19.000.000	10	20.900.000	12	22.700.00 0	14	23.083.63 0	54	95.683.6 30
		3.25.04.2.0 2.0003		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang terfasilitasi dalam pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha ; pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	2.500.00 0	2	7.500.000	4	20.000.000	5	27.000.000	6	30.080.00 0	8	30.588.35 2	27	115.168. 352



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.04.2.0 2.0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	5	5.000.000	5	20.000.000	5	27.000.000	5	30.080.00 0	5	30.588.35 2	25	112.668. 352
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jenis Pengelolaa n	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	85.999.9 50	5	185.000.00 0	5	445.000.00 0	5	515.500.00 0	5	564.133.1 00	5	573.666.9 50	5	2.283.30 0.050
		3.25.04.2.0 4.0001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	5.000.00 0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.500.000	1	17.160.00 0	1	17.450.00 4	1	76.110.0 04
		3.25.04.2.0 4.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Prasarana Pembudidayaan Ikan yang didistribusika n kepada UPT dan Masyarakat Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	4.000.00 0	2	30.000.000	5	120.000.00 0	5	137.000.00 0	5	152.000.0 00	5	154.568.8 00	23	593.568. 800
		3.25.04.2.0 4.0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Sarana Pembudidayaan Ikan yang didistribusika n kepada UPT dan Masyarakat Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	37.000.0 00	2	60.000.000	3	80.000.000	4	93.000.000	4	105.720.0 00	4	107.506.6 68	19	446.226. 668



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.04.2.0 4.0004		Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	Jumlah dokumen yang memuat hasil dan lingkungan yang teruji dari pengendalian penyakit ikan, pengendalian Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	54	60	25.000.000	90	40.000.000	100	75.000.000	125	93.500.000	140	97.000.000	150	98.639.300	665	404.139.300
		3.25.04.2.0 4.0010		Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	Pembinaan dan Pemantauan Bidang Perikanan Budidaya Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	20	20	14.999.950	77	30.000.000	100	75.000.000	120	87.500.000	140	96.000.000	160	97.622.400	617	386.122.400
		3.25.04.2.0 4.0013		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit	Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	1	15.000.000	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.253.100	1	97.879.778	5	377.132.878



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.05	Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan hukum, peraturan, dan standar operasional yang berlaku dalam sektor kelautan dan perikanan, termasuk perizinan, pengelolaan sumber daya alam Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	30	30	7.499.900	35	145.000.000	40	159.500.000	45	175.450.000	50	192.995.000	60	212.294.500	60	885.239.500
		3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau , Waduk , Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	Orang/kelompok	Jumlah pelaku usaha di sektor perikanan yang telah mendapat pengawasan pada tahun berjalan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	32	22	7.499.900	51	145.000.000	73	159.500.000	86	175.450.000	101	192.995.000	106	212.294.500	433	885.239.500
		3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	1) pengawasan oleh Pengawas perikanan dalam memastikan pelaku pembudidayaan ikan tertib melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	10	4.999.900	20	50.000.000	30	55.000.000	35	60.500.000	40	66.550.000	40	73.205.000	175	305.255.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.05.2.0 1.0006		Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan adalah upaya pengawasan oleh Pengawas perikanan dalam memastikan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan  Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-			10	25.000.000	12	27.500.000	15	30.250.000	20	33.275.000	25	36.602.500	82	152.627.500
		3.25.05.2.0 1.0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan adalah upaya pengawasan oleh Pengawas perikanan dalam memastikan pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau pelaku usaha pengangkutan ikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	1	10	2.500.000	20	50.000.000	30	55.000.000	35	60.500.000	40	66.550.000	40	73.205.000	175	305.255.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.05.2.0 1.0012		Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha	-	0	0	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1	122.102.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 4. cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam 5. Batasan pelaku/unit usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yaitu KBLI 08930 terkait Ekstraksi Garam															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan hasil perikanan	Persen	Persentase volume hasil perikanan yang telah diproses atau diolah menjadi produk olahan dibandingkan dengan total volume hasil perikanan yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu <b>Sumber Data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan <b>Formulasi perhitungan</b> $\frac{\text{Total pengolahan}}{\text{total produksi perikanan}} \times 100\%$	13,9	15	30.000.000	15	128.000.000	15	140.800.000	15	154.880.000	15	<b>170.368.000</b>	15	<b>187.404.800</b>	15	781.452.800
		3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi dalam memperoleh Tanda Daftar Usaha <b>Sumber Data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	5.000.000	2	13.000.000	2	14.300.000	2	15.730.000	2	<b>17.303.000</b>	2	<b>19.033.300</b>	11	79.366.300



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.25.06.2.0 1.0005		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data dan informasi usaha berdasarkan skala usaha pengolahan dan pemasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	5.000.00 0	1	13.000.000	1	14.300.000	1	15.730.000	1	17.303.00 0	1	19.033.30 0	6	79.366.3 00
		3.25.06.2.0 2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha di sektor perikanan yang telah menerima pembinaan atau fasilitasi dari pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang mencakup pelatihan, pendampingan teknis, atau pemberian alat/standar yang mendukung jaminan mutu dan keamanan produk perikanan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	Na	20	3.000.00 0	40	45.000.000	50	49.500.000	70	54.450.000	70	59.895.00 0	75	65.884.50 0	325	274.729. 500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.06.2.0 2.0002		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Pembinaan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran sesuai Skala Usaha dan Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	40	21	3.000.000	40	45.000.000	50	49.500.000	70	54.450.000	70	59.895.000	75	65.884.500	326	274.729.500
		3.25.06.2.0 3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	ton	bahan baku yang disediakan untuk industri pengolahan ikan, yang berasal dari hasil perikanan tangkap maupun budidaya. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	2.853,60	10	22.000.000	29,7	70.000.000	39,7	77.000.000	49,7	84.700.000	59,7	93.170.000	69,7	102.487.000	69,7	427.357.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.25.06.2.0 3.0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ton	Peningkatan volume ikan yang tersedia untuk konsumsi masyarakat dan untuk keperluan industri pengolahan ikan dalam suatu daerah kabupaten/kota, yang diukur berdasarkan peningkatan produksi ikan, baik yang berasal dari perikanan tangkap maupun budidaya, yang dapat memenuhi permintaan lokal dan kebutuhan industri pengolahan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	704	10	20.000.000	10	60.000.000	10	66.000.000	10	72.600.000	10	79.860.000	10	87.846.000	700	366.306.000
		3.25.06.2.0 3.0002		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang telah menerima berbagai bentuk fasilitas, bantuan, atau dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu daerah kabupaten/kota, yang mencakup pelatihan, pemberian modal, pengadaan alat produksi, atau dukungan teknis yang membantu	1	2	2.000.000	0	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000		61.051.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						usaha mereka berkembang dan meningkatkan daya saing. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan																
			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							-		-		-		-		-		-		
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan																		
				- Daging	Persen	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan (Produksi tahunan produksi tahunan)	3,92	3,95		4		4		4		4		4		4		23,95



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						1)/produksi tahun n-1 X 100																
				- Telur	Persen	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n- produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,35	3,4	3,5		3,5			3,5		3,5		3,5			20,9	
				- Susu	Persen	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n- produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	1,39	1,40	1,4		1,4			1,4		1,4		1,4			8,4	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Bitar	92,3	93			94	-	95	-	96	-	97	-	98	-	98	-
				Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	Persen	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi	97,9	98			98,1	-	98,2	-	98,3	-	98,4	-	98,5	-	98,5	-
		3.27.02	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	Persen	Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	0,3	0,3	994.732.450	0,3	2.517.999.835	0,3	2.969.799.819,00	0,3	2.466.779.800	0,3	<b>3.013.457.780</b>	0,3	<b>3.614.803.558</b>		14.582.840.792	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.27.02.2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	Jenis Fasilitasi	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	2	2	568.000. 000	2	1.080.000. 000	2	1.298.000. 000	2	1.338.000. 000	2	1.593.800. 000	2	1.911.214. 222	2	7.221.01 4.222
		3.27.02.2.0 2.0002		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Peningkatan kualitas SDG hewan (rumpun atau galur ternak) dapat dilakukan diantaranya melalui program seleksi dan persilangan ternak dan tidak bertentangan dengan PP 48 Tahun 2011 Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	6	3	558.000. 000	1	580.000.00 0	2	638.000.00 0	2	658.000.00 0	3	723.800.0 00	3	868.560.0 00	14	3.468.36 0.000
		3.27.02.2.0 2.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Kegiatan penelitian dan pengembang an, serta penggunaan Sumber Daya Genetik Hewan atau Ternak, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatann ya Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	4	2	10.000.0 00	3	500.000.00 0	3	660.000.00 0	3	680.000.00 0	3	870.000.0 00	5	1.042.654. 222	19	3.752.65 4.222



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.02.2.0 3		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/pakan ternak yang diawasi	Sampel bibit/paka n	1902	1000	114.732. 600	1000	1.075.000. 000	1200	1.272.500. 000	1400	707.159.80 0	1400	955.875.7 80	1400	1.147.050. 936	7400	5.157.58 6.516
		3.27.02.2.0 3.0002		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	733	600	114.732. 600	700	1.075.000. 000	750	1.272.500. 000	800	707.159.80 0	850	955.875.7 80	900	1.147.050. 936	4600	5.157.58 6.516
		3.27.02.2.0 4		Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi	Unit Usaha	31	8	2.000.00 0	22	22.000.000	24	24.200.000	25	26.620.000	30	29.282.00 0	31	35.138.40 0	140	137.240. 400
		3.27.02.2.0 4.0001		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	31	8	2.000.00 0	22	22.000.000	24	24.200.000	25	26.620.000	30	29.282.00 0	31	35.138.40 0	140	137.240. 400



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.02.2.0 5	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha pakan ternak yang dikendalikan dan diawasi	Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang bergerak dalam produksi, distribusi, atau penjualan pakan ternak yang telah dikendalikan dan diawasi Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	13	17	309.999. 850	15	340.999.83 5	15	375.099.81 9	15	395.000.00 0	15	434.500.0 00	15	521.400.0 00	92	2.066.99 9.654
		3.27.02.2.0 5.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	Produksi Benih atau Bibit Ternak adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, penetapan dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	15	17	309.999. 850	15	340.999.83 5	15	375.099.81 9	15	395.000.00 0	15	434.500.0 00	15	521.400.0 00	92	2.066.99 9.654
		3.27.03	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	Persen	Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	78	80	272.560. 004	80	1.117.000. 000	80	1.328.700. 000	80	1.761.570. 000	80	1.817.727. 000	80	1.999.499. 700	80	8.024.49 6.700



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.03.2.0 1	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun, dipelihara dan beroperasi	Unit	Jumlah prasarana peternakan yang telah dibangun, dipelihara, dan saat ini berfungsi secara efektif untuk mendukung kegiatan peternakan di daerah tersebut Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	272.560. 004	8	1.117.000. 000	8	1.328.700. 000	8	1.761.570. 000	8	1.817.727. 000	8	1.999.499. 700	8	8.024.49 6.700
		3.27.03.2.0 2.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisas i Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembang an prasarana pertanian umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembang an prasarana pertanian. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	3	4	270.000. 004	4	267.000.00 0	4	283.700.00 0	4	361.570.00 0	4	397.727.0 00	4	457.499.7 00	4	1.767.49 6.700



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.03.2.0 2.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya adalah pembangunan yang dilakukan dalam konteks pengembang an prasarana pertanian. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	1	2	2.560.00 0	2	100.000.00 0	2	110.000.00 0	2	270.000.00 0	2	267.000.0 00	2	313.700.0 00	2	1.060.70 0.000
		3.27.03.2.0 2.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	Pelaksanaan pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembang an prasarana	1	1	-	1	250.000.00 0	1	275.000.00 0	1	310.000.00 0	1	311.000.0 00	1	362.100.0 00	1	1.508.10 0.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.03.2.0 2.0012		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	-	0	0	1	200.000.00 0	1	330.000.00 0	1	380.000.00 0	1	<b>388.000.0 00</b>	1	<b>446.800.0 00</b>	1	1.744.80 0.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.03.2.0 2.0014		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi i Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	-	0	0	13	300.000.00 0	13	330.000.00 0	13	440.000.00 0	13	454.000.0 00	13	519.400.0 00		2.043.40 0.000
		3.27.04	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	Persen	Persentase kasus penyakit hewan menular yang berhasil ditangani dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan standar waktu tanggap yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mencegah penyebaran penyakit di tingkat populasi ternak Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi perhitungan : Total kasus yang ditangani sesuai waktu tanggap /total seluruh kasus yang ditangani X 100%	93,1	94	405.299. 650	94	644.960.49 5	94	809.456.54 5	95	1.090.402. 199	95	1.189.442. 419	95	1.408.386. 661	95	5.142.64 8.319



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				Jumlah unit usaha peternakan yang terekomendasi NKV	Unit Usaha	Jumlah unit usaha peternakan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi NKV Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	34	35		36	-	37	-	38	-	39	-	40	-	190	-
		3.27.04.2.0 1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesehatan hewan yang dijamin	Persen	Persentase hewan yang dijamin adalah proporsi jumlah hewan ternak yang telah mendapatkan perlindungan atau jaminan, baik melalui program asuransi ternak, bantuan pemerintah, maupun bentuk jaminan kesehatan hewan lainnya, terhadap total jumlah populasi hewan ternak yang tercatat pada periode tertentu di wilayah kerja tertentu.	91,5	90	15.500.000	90	110.000.000	90	137.000.000	90	180.000.000	90	195.000.000	90	244.500.000	90	866.500.000
		3.27.04.2.0 1.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	Lokasi terdampak wabah penyakit hewan menular yang ditanggulangi Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	51	24	7.500.000	22	70.000.000	22	77.000.000	22	94.000.000	22	102.400.000	22	122.640.000	22	466.040.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.27.04.2.0 1.0005		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan dilakukan dengan pengambilan, pengujian, analisis data dan pelaporan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagai dasar pengambilan kebijakan kehatan hewan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	12	6	3.000.00 0	22	20.000.000	22	30.000.000	22	43.000.000	22	46.300.00 0	22	60.930.00 0	22	200.230. 000
		3.27.04.2.0 1.0006		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	Penyidikan penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilaksanakan apabila hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderunga n peningkatan, muncul dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan disuatu wilayah dan/atau adanya dugaan timbulnya wabah disuatu daerah sekurang- kurangnya dengan pengambilan sampel dan/atau spesimen untuk dapat dikirim ke laboratorium regional berikut data	4	26	5.000.00 0	5	20.000.000	5	30.000.000	5	43.000.000	5	46.300.00 0	5	60.930.00 0	51	200.230. 000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						pendukung. Dalam mendukung penyidikan dilakukan validasi penyakit hewan dan zoonosis pada hewan untuk kemudian dilaporkan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan															
		3.27.04.2.0 2	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	Dokumen	Jumlah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait dalam rangka pemasukan (pemasokan) dan pengawasan terhadap ternak yang masuk atau keluar dari suatu daerah atau wilayah peternakan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	279	700	5.991.400	750	20.000.000	800	32.000.000	850	45.000.000	900	47.500.000	950	62.250.000	4950	206.750.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.04.2.0 2.0004		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	279	75	5.991.400	150	20.000.000	175	32.000.000	200	45.000.000	225	47.500.000	250	62.250.000	1075	206.750.000
		3.27.04.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Pelayanan	Jumlah layanan yang diberikan oleh laboratorium dan fasilitas medis veteriner dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, serta pelayanan kesehatan lainnya bagi hewan ternak yang dikelola oleh instansi terkait, untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta mencegah penyebaran penyakit.	2268	575	337.000.000	660	376.000.000	780	487.600.000	900	684.902.199	1020	750.392.419	1140	845.431.661	5075	3.144.326.279



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.27.04.2.0 3.0001		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	Pelayanan jasa Laboratorium Veteriner yang dimaksud adalah pelayanan di laboratorium sederhana yang ada di Puskesmas. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	158	75	40.000.0 00	160	150.000.00 0	180	189.000.00 0	200	279.902.19 9	220	306.892.4 19	240	347.581.6 61	1075	1.273.37 6.279



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.04.2.0 3.0002		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan termasuk di dalamnya pemenuhan sarana prasarana pendukung beserta pengembang an kompetensi tenaga kesehatan hewan sebagai pelaksanab jasa medik veteriner. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	2110	500	297.000. 000	500	226.000.00 0	600	298.600.00 0	700	405.000.00 0	800	443.500.0 00	900	497.850.0 00	4000	1.870.95 0.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.27.04.2.0 4		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	Unit Usaha	Jumlah unit usaha peternakan yang telah diterapkan dan diawasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	151	40	6.059.750	150	65.000.000	170	71.500.000	190	80.500.000	215	86.550.000	240	125.205.000		428.755.000
		3.27.04.2.0 4.0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Pengawasan peredaran terhadap hewan dan produk hewan di wilayah Kabupaten/Kota Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	52	20	2.999.750	50	20.000.000	55	22.000.000	60	24.200.000	70	25.620.000	80	38.182.000	335	130.002.000
		3.27.04.2.0 4.0004		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	Pelaksanaan pengujian produk hewan dilaksanakan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, yaitu laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimia sederhana, cemaran. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	60	0	0	60	15.000.000	65	16.500.000	70	20.000.000	75	22.000.000	80	34.200.000	350	107.700.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.04.2.0 4.0005		Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Unit Usaha	Pembinaan unit usaha dalam rangka penerapan persyaratan hygiene sanitasi mencakup penilaian dan penerbitan NKV. Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	39	20	3.060.000	40	30.000.000	50	33.000.000	60	36.300.000	70	38.930.000	80	52.823.000	320	191.053.000
		3.27.04.2.0 5		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Laporan	Jumlah lokasi atau fasilitas peternakan yang telah diawasi untuk memastikan penerapan dan pemenuhan persyaratan teknis terkait kesejahteraan hewan Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	3396	3300	40.748.500	251	73.960.495	251	81.356.545	251	100.000.000	251	110.000.000	251	131.000.000	3390	496.317.040
		3.27.04.2.0 5.0003		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Unit	Pembinaan dilakukan pada unit kesejahteraan hewan untuk menjamin penyelenggaraan kesehatan hewan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	251	248	40.748.500	3300	73.960.495	3320	81.356.545	3350	100.000.000	3370	110.000.000	3390	131.000.000	3390	496.317.040



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.05	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Persen	Persentase tingkat pengendalian dan penanggulangan bencana yang dilakukan dalam sektor peternakan, yang mencakup upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan terkait bencana alam atau non-alam yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan dan kesejahteraan hewan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	100	100	3.600.450	100	73.960.495	100	81.356.545	100	6.526.981.019,96	100	<b>98.441.419</b>	100	<b>108.285.561,00</b>	100	6.889.025.039
		3.27.05.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mempengaruhi sektor peternakan yang telah berhasil ditangani dan dikendalikan, termasuk bencana alam maupun non-alam yang mengancam keberlanjutan peternakan dan kesejahteraan hewan, serta upaya pemulihan yang dilakukan setelah bencana tersebut. Sumber Data : Dinas	8	1	3.600.450	8	73.960.495	8	81.356.545	8	6.526.981.019,96	8	<b>98.441.419</b>	8	<b>108.285.561,00</b>	41	6.889.025.040



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		3.27.05.2.0 1.0004		Penanggulangan Bencana Non alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	8	1	3.600.45 0	3	3.960.495	4	4.356.545	4	526.981.01 9,96	4	10.000.00 0	4	11.000.00 0	4	556.298. 060
		3.27.05.2.0 1.0007		Penanggulan g Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	Penanggulan an bencana bidang peternakan terdiri dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	5	70.000.000	5	77.000.000	5	6.000.000. 000,00	5	88.441.41 9	5	97.285.56 1	25	6.332.72 6.980



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.06	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Rekomendasi Perijinan	Persen	Persentase peningkatan jumlah pengajuan rekomendasi perijinan yang diterima dan diproses dalam periode waktu tertentu, baik untuk perijinan sektor peternakan, perikanan, atau sektor terkait lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan usaha di bidang tersebut. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Formulasi : (jumlah ajuan tahun n- jumlah ajuan tahun n- 1)/ajuan tahun n-1 X 100%	7	7	2.999.90 0	7	30.000.000	7	33.000.000	7	36.300.000 ,00	7	<b>39.930.00 0</b>	7	<b>43.923.00 0</b>	7	183.153. 000
		3.27.06.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian	Izin usaha	Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	<b>9.982.500</b>	5	<b>10.980.75 0</b>	25	45.788.2 50



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.06.2.0 1.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	-	0	0	5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	9.982.500	5	10.980.750	25	45.788.250
		3.27.06.2.0 2		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Rekomendasi	-	2	2.999.900	10	15.000.000	12	16.500.000	14	18.150.000	16	19.965.000	18	21.961.500	72	91.576.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.06.2.0 2.0006		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Laporan	Pengawasan terhadap Operasional pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan kepada pasien dan klien di Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner. pasar hewan adalah pasar tempat berlangsungnya jual beli hewan ternak seperti sapi,kerbau,kambing,dan lain sebagainya. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	32	10	2.999.900	20	15.000.000	30	16.500.000	35	18.150.000	40	19.965.000	45	21.961.500	180	91.576.500
		3.27.06.2.0 3		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan dan diawasi untuk unit-unit usaha yang terkait dengan Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	10	7.500.000	10	8.250.000	15	9.075.000	15	9.982.500	15	10.980.750	65	
		3.27.06.2.0 3.0002		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Laporan	Kewenangan Kabupaten/Kota di tingkat pengecer Sumber Data : Dinas	-	0	0	10	7.500.000	10	8.250.000	15	9.075.000	15	9.982.500	15	10.980.750	65	45.788.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						Peternakan dan Perikanan															
		3.27.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Persentase peningkatan peternak terampil	Persen	Persentase peningkatan jumlah peternak yang terampil dalam menjalankan praktik peternakan yang sesuai dengan standar, mengacu pada hasil pelatihan, pendidikan, atau pembinaan yang diberikan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial peternak. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	9,2	10	275.000. 000	10	400.000.00 0	10	560.000.00 0	10	626.000.00 0	10	<b>698.600.0 00</b>	10	<b>778.460.0 00</b>	10	3.063.06 0.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.07.2.0 1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	Orang	Jumlah peternak yang menerima layanan atau fasilitas penyuluhan peternakan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam periode waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam usaha peternakan. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	157	120	275.000.000	80	400.000.000	175	560.000.000	190	626.000.000	200	698.600.000	200	778.460.000	965	3.063.060.000
		3.27.07.2.0 1.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPP/Poslulhdes dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian sebagai tempat data dan informasi, tempat gerakan pemabngunan pertanian, tempat pembelajaran, pengembangan jejaring kemitraan para pelaku utama dan pelaku usaha, tempat konsultasi agribisnis. Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan	-	0	0	5	50.000.000	5	75.000.000	5	92.500.000	5	106.750.000	5	122.425.000	25	446.675.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulas i Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baselin e Perenc anaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	3	6	7	8		12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		3.27.07.2.0 1.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	14	10	275.000. 000	2	350.000.00 0	15	485.000.00 0	15	533.500.00 0	16	<b>591.850.0 00</b>	200	<b>656.035.0 00</b>	258	2.616.38 5.000

#### 4.4 Program, Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk mendukung keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan rumusan agenda prioritas yang diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran misi II “Meningkatnya Produktivitas Daerah” yang didukung Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang mantap, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Bantuan akses sarana produksi dan pemasaran produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan dalam rangka ketahanan pangan.

Untuk mendukung agenda-agenda prioritas tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Daftar Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; dan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pelatihan teknis budidaya ikan konsumsi dan hias dan bantuan benih, pakan, sarana
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya pengolahan produk hasil perikanan	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pendampingan Akses Pasar (Hilirisasi Sektor Perikanan) -
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana peternakan	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota; Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Benih/Bibit Ternak -
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan yang ada	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Prasarana Pertanian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan/ pendampingan usaha peternakan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan petani

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2025

#### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang maupun jasa. Sub bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Blitar khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang

dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Peternakan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target yang diemban oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan Misi II RPJMD 2025-2029 yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025-2030 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indikator Tujuan: Kontribusi Sektor Perikanan PDRB terhadap PDRB	%	Besarnya sumbangan atau andil dari kegiatan usaha di bidang perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, maupun pemasaran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar. <b>Sumber data :</b> <b>Rilis BPS</b>	4,36	4,37	4,39	4,42	4,46	4,54	4,59
2	Indikator Tujuan: Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	Besarnya sumbangan dari kegiatan ekonomi di bidang peternakan, seperti usaha budidaya ternak, produksi hasil ternak (daging, susu, telur, dan produk olahan ternak) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dalam periode waktu tertentu. <b>Sumber data :</b> <b>Rilis BPS</b>	12,6	12,7	12,80	12,9	13,1	13,3	13,5
3	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan	73,4	73,6	73,8	74,1	74,5	74,8	75,0

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pencapaian sasaran pembangunan. <b>Sumber data : Inspektorat</b>							
4	Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan			-5,77						
	- Perikanan Tangkap	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan tangkap (produksi tangkap PUD dan produksi tangkap laut) dari satu periode ke periode berikutnya.  <b>Sumber Data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan  <b>Formulasi Perhitungan :</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	-12,74	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- Perikanan Budidaya (Konsumsi)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya.  <b>Sumber Data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan  <b>Formulasi Perhitungan:</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	2,37	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	- Perikanan Budidaya (Non Konsumsi)	%	Tingkat pertumbuhan total produksi perikanan budidaya (non konsumsi) dari satu periode ke periode berikutnya. <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan									
	- Daging	%	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,92	3,95	4	4	4	4	4
	- Telur	%	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,35	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	- Susu	%	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing <b>Sumber Data :</b> <b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan</b> (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar <b>Sumber data :</b> Dinas Peternakan dan Perikanan <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah desa yang terkendali/jumlah total desa X 100	92,3	93	94	95	96	97	98

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar	%	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi <b>Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b> <b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah produk layak edar/produk yang diawasi X 100	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan secara spesifik untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKK berperan sebagai parameter operasional yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan perikanan, serta menjadi dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terukur. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi tangkapan ikan dan sumber daya hayati perairan lainnya yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan di perairan laut, perairan umum daratan (sungai, danau, waduk, rawa), maupun perairan lainnya dibandingkan dengan target produksi dalam satu periode tertentu <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	3093,8	3.109	3.125	3.140	3.156	3.172	3.188

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Produksi Perikanan Budidaya (Konsumsi)	Ton	Realisasi produksi perikanan budidaya yang diperuntukkan langsung untuk konsumsi dibandingkan dengan target produksi dalam satu periode tertentu. <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	17.301	17.734	18.177	18.632	19.097	19.575	20.064
	Produksi Perikanan Budidaya Non Konsumsi (Hias)	Ekor	Realisasi produksi perikanan budidaya hias dibandingkan dengan target produksi dalam satu periode tertentu <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	204.827.074	205.031.900	205.236.930	205.442.160	205.647.600	205.853.240	206.059.090
2	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan									
	- Daging	%	Peningkatan total produksi daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, itik, ayam pedaging, entok, kelinci, puyuh <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b> Formulasi Perhitungan (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1	3,92	3,95	4	4	4	4	4
	- Telur	%	Peningkatan total produksi telur ayam buras, ayam ras, itik, entok, puyuh <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b> Formulasi Perhitungan (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	3,35	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	- Susu	%	Peningkatan total produksi susu sapi dan kambing <b>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b> Formulasi Perhitungan (Produksi tahun n-produksi tahun n-1)/produksi tahun n-1 X 100	1,39	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formula Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar <b>Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan</b> Formulasi Perhitungan : Jumlah desa yang terkendali/jumlah total desa X 100	92,3	93	94	95	96	97	98



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai amanat Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
2. Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, tingginya biaya pakan, keterbatasan teknologi pengolahan hasil, hingga meningkatnya persaingan pasar di tingkat regional maupun global. Di satu sisi, sektor peternakan dan perikanan diharapkan mampu menyediakan ketersediaan protein hewani untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, namun di sisi lain juga dituntut untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui hilirisasi produk dan penguatan kemandirian pelaku usaha.
3. Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar 2025-2029 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor peternakan dan perikanan, yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya. Target capaian kinerja di dalam dokumen Renstra ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja sektor peternakan dan perikanan akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan di segala bidang. Hal ini karena ketersediaan protein hewani yang cukup, peningkatan produktivitas, penguatan kemandirian pelaku usaha, serta daya saing produk hasil peternakan dan perikanan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan..



4. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa program pembangunan peternakan dan perikanan dapat terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin melibatkan peran serta masyarakat serta pelaku usaha. Kebutuhan pendanaan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor peternakan dan perikanan yang cukup besar tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, berbagai alternatif pendanaan perlu diupayakan, baik melalui dukungan pemerintah pusat, kerja sama dengan swasta, maupun pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan

## **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 menjelaskan tata cara, prosedur, dan aturan yang harus diikuti serta selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kaidah yang jelas, pelaksanaan Renstra dapat berjalan lebih efektif dan efisien juga mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.

## **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

1. Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Pengendalian Renstra dilaksanakan secara proaktif melalui pemantauan kinerja program dan kegiatan, serta pengawasan penggunaan anggaran. Evaluasi Renstra dilakukan secara periodik untuk menilai pencapaian target, efektivitas program, dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra di masa depan, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra selaras dengan RPJMD.
3. Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini setidaknya-tidaknya dilakukan



satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2028) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

4. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKjIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Blitar, 19 September 2025

**PIR. KEPALA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN**



**HERI WIDYATMOKO, S.Pt**

Pembina Tk. I

NIP. 197201151998031006